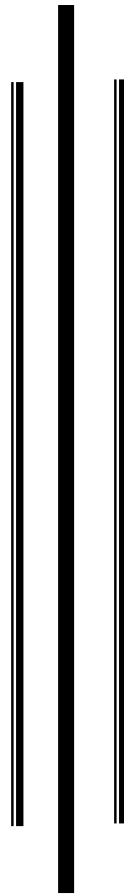




KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2019	32
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2019	32
1.4. Sistematika Dokumen KUA Tahun 2019	34
BAB II. KONDISI EKSTING KABUPATEN TEGAL	35
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	35
2.2. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah	40
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD.....	56
3.1. Jumlah Penduduk	56
3.2. Pertumbuhan Ekonomi	56
3.3. Kebutuhan Investasi	57
3.4. Produktivitas Perkapita	58
3.5. Inflasi	58
3.6. Pengangguran Terbuka	59
3.7. Kemiskinan	60
3.8. Kejadian Luar Biasa dan Bencana Alam	61
3.9. Keamanan dan Ketentraman	61
3.10. Rangkuman Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD	62
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 2019	63
4.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah	63
4.1.1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah	64
4.1.2. Kebijakan Umum Dana Perimbangan	66
4.1.3. Kebijakan Umum Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	67
4.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah	69
4.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung.....	69
4.2.2. Kebijakan Belanja Langsung	70
4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	87
BAB V PENUTUP	9

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten Tegal dalam RKPD Tahun 2019	18
Tabel 1.2. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis dengan Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah dan Program-Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal	18
Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Tegal Tahun 2015	35
Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Tegal pada Tahun 2012	38
Tabel 2.3. Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2012-2016	38
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Tegal 2010 - 2014	39
Tabel 2.5. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2016	43
Tabel 2.6. Struktur Perekonomian Kabupaten Tegal Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Tahun 2012 - 2016	44
Tabel 2.7. PDRB Per Kapita Kabupaten Tegal Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (Dalam Juta Rupiah)	48
Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014	49
Tabel 2.9. Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015	50
Tabel 2.10. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2010-2016.....	51
Tabel 2.11. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal Tahun 2011-2016.....	51
Tabel 2.12. Jumlah Unit Usaha dan Nilai Investasi Kabupaten Tegal Tahun 2010-2015.....	54
Tabel 2.13. Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal Tahun 2010-2015	54
Tabel 2.14. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tegal Tahun 2010-2015.....	55
Tabel 2.15. Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tegal Tahun 2010-2015 ..	55
Tabel 3.1. Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016	56
Tabel 3.2. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015	58
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tegal Tahun 2010-2016	61
Tabel 3.4. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dan Sosial Kab. Tegal Tahun 2019.....	62
Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019	68
Tabel 4.2. Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan, Indikator Dan Target Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2019.....	71
Tabel 4.3. Rekapitulasi Belanja Langsung per –OPD di Kab. Tegal Tahun 2019	84
Tabel 4.4. Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019	86
Tabel 4.5. Struktur Alokasi Anggaran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019	86

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pencapaian tujuan pembangunan di daerah tentunya dengan upaya merealisasikan rencana program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahunnya. Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Tegal Tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019.

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Tahun Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019. RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 didalamnya memuat visi Kabupaten Tegal yang ingin dicapai yaitu **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera”**dengan slogan *Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal*. Visi tersebut akan dicapai melalui misi:

- a. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsive terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.

- b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
- c. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
- d. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan amanat dalam RPJMD maka Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan kebijakan tahunan sebagai penjabaran RPJMD dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas - bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal dan juga mengakomodir hasil reses DPRD melalui usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tegal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 tentunya diarahkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,

kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019 ditelaah merujuk pada Data Capaian Kinerja masing-masing Urusan selama 5 (lima) tahun terakhir dan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2017 yang diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas psikologis seseorang disebut hidup layak. Apabila seseorang berada dalam kategori berada di bawah garis kemiskinan, dimungkinkan kondisi kehidupannya masih belum layak. Di Kabupaten Tegal tren angka kemiskinan selalu menurun setiap tahun. Meskipun demikian tantangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin masih menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan di Kabupaten Tegal. Prioritas itu Kemiskinan di Kabupaten Tegal disebabkan kurangnya pendapatan untuk menutup kebutuhan hidup sesuai garis kemiskinan. Untuk itu diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin atau mengganti pendapatan penduduk miskin dengan bantuan sosial. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan publik di Kabupaten Tegal. Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, angkanya berada pada kisaran 10,58 dan menurun pada tahun 2014 menjadi 9,87. Pada tahun 2015 dan 2016 naik masing-masing menjadi 10,09 dan 10,10. Pada tahun 2017 angkanya kembali turun menjadi 9,9%. Angka ini masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01% dan rata-rata nasional sebesar 10,64%.

2. Pelayanan Dasar Pendidikan

Sederet permasalahan pelayanan pendidikan dasar disebabkan beberapa hal, antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar, terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kependidikan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan, utamanya dari keluarga kurang mampu, serta kondisi sekolah yang kurang representatif sehingga menjadi permasalahan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan di sektor pendidikan perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan keberpihakan pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan program pendidikan nonformal dan informal. Program-program ini didesain untuk menjamin setiap anak usia sekolah dan penduduk Kabupaten Tegal memperoleh layanan pendidikan di sekolah baik formal dan nonformal. Dengan demikian diharapkan Angka Partisipasi Kasar dan Murni pendidikan akan meningkat. Kondisi eksisting pembangunan pendidikan secara agregat di Kabupaten Tegal masih menggambarkan persoalan akses pendidikan yang belum didapat dinikmati oleh sebagian masyarakat. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) misalnya, di Kabupaten Tegal

menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2012 menunjukkan angka 5,78 tahun, meningkat menjadi 5,85 tahun pada tahun 2013. Pada tahun 2016 angkanya menjadi 6,54 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2012 angkanya 11,16 tahun, tahun 2015 telah menjadi 12 tahun dan tahun 2016 sebesar 12,01 tahun.

3. Derajat kesehatan masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui dukungan dana dan fasilitas/sarana dan prasarana kesehatan serta dukungan sumberdaya manusia bidang kesehatan yang belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu permasalahan kesehatan yang menonjol adalah permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan Angka Kematian bayi dan Balita adalah tatalaksana neonatus di puskesmas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya; RS rujukan masih belum memiliki alkes pelayanan neonatus yang memadai; masih ada nakes belum mengetahui kegawatdarutan neonatus (kualitas SDM berdampak pada kualitas pelayanan); penyebab kematian bayi masih dominan karena BBLR (berat bayi lahir rendah) berhubungan dengan asupan gizi ibu hamil; penyebab tidak langsung adalah pendidikan ibu yang masih rendah. Permasalahan kesehatan yang perlu mendapat penanganan serius dan akseleratif adalah isu bayi, balita dan ibu. Angka Kematian Bayi diukur per 1.000 kelahiran. Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Tegal dari tahun 2013 sampai dengan 2016 cenderung meningkat setiap tahunnya, sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan.

4. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017 (data tahun 2016 tidak tersedia dari BPS). Secara umum, gap antara TPT Kabupaten Tegal dengan TPT Provinsi Jawa Tengah menjadi menurun di tahun 2017. Meskipun demikian, tingkat TPT yang mencapai 7,33% masih relatif tinggi; bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2012. Angka ini jauh menurun dibanding angka TPT tahun sebelumnya yang sebesar 9,52%. Meskipun berada pada posisi cukup rendah, perlu diperhatikan bahwa tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2012 angka TPT cenderung meningkat, yaitu 6,05%, 6,93% pada tahun 2013, 8,47% pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati gambar 4.11. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemkab Tegal agar APBD dan kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan daya ungkit yang besar untuk mengurangi tingkat pengangguran. Perhatian terhadap pengangguran perlu diberi porsi yang lebih. Dari total penduduk miskin di Kabupaten Tegal, 49,26% diantaranya adalah pengangguran, sementara 50,74% diantara bekerja namun berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan.

5. Rendahnya Daya Saing Ekonomi Lokal

Berdasar data PDRB pengeluaran, daya saing Kabupaten Tegal masih relatif rendah. Sekitar 85% perekonomian Kabupaten Tegal ditunjang dari konsumsi masyarakat, sekitar 24% ditunjang dari investasi, dan mengimpor sekitar 19% total perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Tegal masih relatif belum kuat dan investasi masih relatif kecil. Perekonomian Kabupaten Tegal secara umum ditopang oleh tiga sektor besar yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Sektor perdagangan, khususnya perdagangan retail didominasi oleh pelaku UMKM dalam skala kecil dan menengah dan juga industri rumah tangga yang menghasilkan produk-produk lokal seperti kerajinan dan kuliner. Keberadaan para pelaku UMKM tersebut tersebar pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal dan diantaranya terpusat pada sentra-sentra kerajinan, seperti kerajinan batik, kerajinan kulit dan produk kuliner seperti tahu atau makan ringan berbahan baku lokal.

Kondisi saat ini muncul perspektif dari masyarakat mengenai lemahnya akses permodalan bagi UMKM, terbatasnya kesempatan untuk promosi dan akses pemasaran bagi produk-produk UMKM lokal dan juga kurangnya pelatihan atau pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Terkait dengan hal tersebut di sisi lain banyak tenaga kerja usia produktif yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan bekerja di sektor-sektor informal. Kondisi tersebut memunculkan isu perlunya pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja bagi para pekerja usia produktif. Beberapa masalah lain yang terjadi adalah belum adanya database yang baik, serta manajemen produksi dan pemasaran produk Kabupaten Tegal yang belum baik. Hal ini tentu akan mengurangi daya saing Kabupaten Tegal.

6. Belum Optimalnya Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal masih menjadi fokus perhatian utama, diantaranya yang terkait secara langsung dengan kepentingan publik adalah:

a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pada sektor infrastruktur Jalan dan Jembatan, berdasarkan data Kabupaten Tegal mempunyai 3 ruas Jalan Nasional (Arteri Primer) dengan panjang 68 Km, 2 Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer) dengan panjang 55,21 km, dan 516 ruas Jalan Kabupaten (Kolektor dan lokal) dengan panjang 847,27 Km. Dari data kondisi jalan 5 tahun terakhir belum ada peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah jalan yang kondisinya baik, bahkan jumlah jalan yang rusak makin bertambah.

b. Sarana Transportasi

Secara letak Kabupaten berada di wilayah yang sangat strategis dimana secara transportasi dilintasi 3 Jalan Arteri yaitu Jalur Pantura, Ruas Jalan Tegal – Cilacap, dan Ruas Ketanggungan – Prupuk. Hal ini menyebabkan Kabupaten Tegal menjadi Jalur padat baik untuk transportasi penumpang maupun barang. Terdapat 5 Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi dan 11 trayek angkutan kota dan perdesaan. Disamping itu terdapat titik /simpul pemberangkatan bus penumpang jurusan Kabupaten Tegal – Jakarta.

c. Infrastruktur Persampahan

Kabupaten Tegal memiliki tiga macam sarana persampahan, yaitu tempat pembuangan akhir (TPA) berjumlah satu, tempat pembuangan sementara (TPS) berjumlah 105 TPS, dan bank sampah berjumlah 85. Ketiga macam sarana tersebut tersebar di Kabupaten Tegal, TPA berada di Desa Penujah, TPS tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal kecuali pada Kecamatan Pagerbarang dan Waruteja, lalu bank sampah tersebar pada setiap kecamatan di Kabupaten Tegal kecuali di Kecamatan Suradadi, Talang, Jatinegara, Lebaksiu, Balapulang, dan Pagerbarang. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2016 sebesar 1.429.386 jiwa, maka keberadaan infrastruktur persampahan masih jauh dari memadai.

d. Infrastruktur Sanitasi

Berdasarkan data profil sanitasi cakupan layanan untuk *on site system* sebesar 65% dari total penduduk Kabupaten Tegal, yaitu terdiri atas sistem *on site individual* (tangki septik) mencakup 63,85% dan sistem *on site komunal* (MCK, MCK++) mencakup 1,15%. Jumlah rumah yang belum mempunyai sarana jamban sebesar 13,12%. Sedangkan untuk drainase belum tersedia dan terdata dengan baik.

e. Infrastruktur Jaringan Air Bersih

Sebagaimana data yang terpaparkan dalam bab 2 di atas cakupan layanan air bersih perpipaan dengan PDAM baru memenuhi 17%, Pamsimas mencapai 8%, sedangkan sisanya non perpipaan mencapai 75%. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan berupa jumlah penduduk yang telah memiliki akses air minum baik dari pelayanan PDAM, PAMSIMAS dan sumur pribadi di Kabupaten Tegal mencapai 78,75%.

f. Pengembangan Wilayah

Berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai, 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhturi, Dukuwaru, dan Balapulang dimana didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, Bojong, Jatinegara dimana memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus. Dan 4) Kecamatan Pagerbarang dan Kedungbanteng dimana Perkembangan masing-masing kecamatan masih tergolong lamban karena terdapat faktor-faktor yang menghambat perkembangannya. Wilayah 4 ini yang perlu perhatian khusus untuk agar dapat sejajar dengan kecamatan lainnya.

7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Kinerja sebuah instansi atau unit kerja seringkali berujung pada permasalahan sumber daya manusia. Alasan yang dikemukakan oleh SKPD seringkali akibat permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada. Pembinaan kepegawaian membutuhkan beberapa instrumen antara lain: pemetaan kompetensi

pegawai, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi pegawai, seleksi terbuka penempatan jabatan, penataan pegawai sesuai dengan kompetensinya, dan tersusunnya data profil pegawai secara baik serta penerapan sistem *reward and punishment*. Untuk itu penataan sistem manajemen sumberdaya manusia perlu menjadi perhatian dengan baik. Penataan kepegawaian dibutuhkan untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Sumber daya manusia yang kompeten juga merupakan sumber daya utama bagi pewujudan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, karena menyangkut hajat hidup seluruh warga negara mulai lahir hingga menemui ajalnya. Mengingat strategisnya urusan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara berkualitas. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan administrasi kependudukan antara lain akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Keluarga sebelum tahun 2012 masih menggunakan sistem manual. Baru pada tahun 2012 menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Meskipun telah menggunakan SIAK, untuk pencatatan akta kematian yang rendah karena minat masyarakat untuk mencatatkan kematian keluarganya juga rendah. Masyarakat mendaftarkan kematian keluarganya hanya ketika akan memproses waris secara resmi di pengadilan. Apabila waris diselesaikan secara kekeluargaan, masyarakat umumnya tidak membuat akta kematian bagi keluarganya yang telah meninggal.

8. Peningkatan daya saing pariwisata dan pengembangan destinasi wisata lokal

Pariwisata adalah salah satu sektor yang mempunyai daya ungkit yang sangat kuat terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah atau bahkan suatu negara. Industri pariwisata yang kuat, maju dan berkembang sangat berdampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Banyak daerah yang perekonomiannya berkembang pesat karena didukung oleh perkembangan pariwisata di daerahnya. Saat ini semakin banyak bermunculan destinasi pariwisata baru di daerah-daerah di sekitar Kabupaten Tegal. Semakin mudahnya akses transportasi untuk menjangkau daerah-daerah tersebut, antara lain adanya jalan Tol, semakin meningkatkan persaingan dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata. Di sisi lain kecenderungan wisatawan baik lokal maupun luar daerah ataupun mancanegara untuk berwisata tidak lagi terbatas menikmati obyek wisata yang sudah ada, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam berwisata. Dengan demikian diversifikasi obyek wisata semakin dibutuhkan dan disisi lain pengembangan fasilitas-fasilitas terhadap obyek wisata yang ada juga diperlukan. Dengan semakin meningkatnya persaingan di bidang pariwisata tidak hanya dengan daerah-daerah sekitarnya tapi juga di daerah-daerah lain maka daya saing pariwisata

di Kabupaten Tegal harus semakin ditingkatkan, tidak hanya dengan membenahan obyek-obyek wisata yang sudah ada dan populer seperti Guci, Purwahamba atau Cacaban, tetapi juga dengan mengembangkan potensi destinasi-destinasi pariwisata baru yang ada di beberapa wilayah kecamatan atau desa di Kabupaten Tegal. Saat ini muncul adanya anggapan dari masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Tegal belum serius dalam membenahi obyek wisata yang ada di Kabupaten Tegal dan juga kurang memberi perhatian terhadap pengembangan potensi obyek-obyek wisata yang ada di beberapa wilayah kecamatan atau desa. Kondisi ini memunculkan adanya isu mengenai peningkatan daya saing pariwisata di Kabupaten Tegal dan pengembangan destinasi wisata lokal sebagai alternative tujuan wisata baru di Kabupaten Tegal.

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan di Kabupaten Tegal Tahun 2019, mengingat sampai dengan bulan Maret 2017 persentase kemiskinan Kabupaten Tegal masih cukup tinggi sebesar 9,9%, walaupun masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01% dan rata-rata nasional sebesar 10,64%. Jika dibandingkan rata-rata jumlah penduduk miskin se-Jawa Tengah, Kabupaten Tegal berada pada ranking ke 24. Selama 4 (empat) tahun terakhir dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat fluktuasi terhadap tren jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal, dimana pada Tahun 2014 persentase kemiskinan sebesar 9,83% (Jawa Tengah 13,8%), kemudian meningkat di Tahun 2015 menjadi 10,09% (Jawa Tengah 13,58%) dan di Tahun 2016 sebesar 10,10% (Jawa Tengah 13,27%), selanjutnya mengalami penurunan di Tahun 2017 menjadi sebesar 9,9% (Jawa Tengah 13,01%).

Namun demikian jika melihat dari indeks kedalaman kemiskinan di Tahun 2016 pada angka 1,03 dapat diketahui rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Ada peningkatan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin. Demikian pula jika melihat dari indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tegal di Tahun 2016 pada angka 0,23 artinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah. Penduduk miskin semakin homogen kasus, karakter atau keadaannya, sehingga program penanggulangan kemiskinan semestinya relatif mudah untuk menentukan sarannya. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus dilaksanakan secara sistematis melalui sinergitas program dan lintas OPD dengan fokus dan lokus sasaran sesuai data base kemiskinan yang disepakati.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan kualitas

sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013-2016 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tersebut, IPM Kabupaten Tegal meningkat dari 63,50 pada Tahun 2013, menjadi 64,10 pada Tahun 2014, kemudian meningkat menjadi 65,04 pada Tahun 2015, dan kembali meningkat menjadi 65,84 pada Tahun 2016. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2016 sebesar 1,24 lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,9. Komponen utama yang menjadi tolok ukur pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah dari sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

Derajat kesehatan dan status kesehatan masyarakat diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), dimana pada Tahun 2016 mencapai 71,02 tahun. Sedangkan pembangunan sektor pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk. Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal cukup besar, dimana terjadi kecenderungan peningkatan HLS dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016, yaitu 11,63 tahun pada Tahun 2013 meningkat menjadi 12,01 tahun pada Tahun 2016. Indikator lain adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), selama kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2013 rata-rata lama sekolah 5,85 tahun, maka di Tahun 2016 menjadi 6,54 tahun.

Isu lain terkait dengan adanya bonus demografi, secara kuantitas penduduk usia kerja akan meningkat dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tentunya harus ada antisipasi untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka masih menjadi pekerjaan rumah utama Pemerintah Kabupaten Tegal. Meskipun demikian ada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka jika pada Tahun 2014 sebesar 8,47% kemudian meningkat menjadi 9,52% di Tahun 2015, maka pada Tahun 2017 menurun menjadi 7,33%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu 5,68% di Tahun 2014, menjadi 4,99% di Tahun 2015, kemudian kembali turun pada angka 4,57% di Tahun 2017. Perlu ada kebijakan dan program yang dapat mengantisipasi tingginya angka pengangguran, karena akan dapat berdampak pada timbulnya masalah-masalah di masyarakat, seperti peningkatan jumlah penduduk miskin, kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta permasalahan sosial lainnya.

3. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif

Sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tegal telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar masih dari kategori Industri Pengolahan dimana pada Tahun 2013 sebesar 31,57% meningkat di Tahun 2016 menjadi 33,34%. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pada Tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 16,70% menurun menjadi 14,84% di Tahun 2016. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor pada Tahun 2016 berada pada posisi kedua penyumbang kontribusi PDRB memberikan kontribusi sebesar 16,49%, sedangkan pada Tahun 2014 masih pada posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 14,84%. Adapun subkategori yang memberikan kontribusi terbesar dan sangat dominan dalam kategori Industri Pengolahan pada Tahun 2016 adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 60,21%.

Memperhatikan data struktur perekonomian Kabupaten Tegal, maka perlu ada keberpihakan kebijakan maupun program untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perdagangan dengan terus mengembangkan potensi sektor industri. Pemanfaatan potensi bahan baku yang berlimpah dari sektor pertanian dengan produktifitas industri makanan dan minuman tentu akan memiliki daya ungkit perekonomian lokal yang cukup signifikan. Daya saing ekonomi lokal harus didukung dengan inovasi dan kreativitas daerah sehingga dapat terus menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru terutama pada lapangan usaha industri kreatif. Menumbuhkembangkan industri kreatif harus didukung oleh kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, jejaring informasi dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual.

4. Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah

Beberapa masalah dan potensi terkait sarana prasarana dan infrastruktur wilayah antara lain masih kurang memadainya sarana perniagaan; sarana transportasi umum; sarana persampahan; prasarana jalan; prasarana air bersih; prasarana drainase dan prasarana sanitasi. Kondisi sarana perniagaan berupa pasar masih menjadi prioritas untuk dilakukan pembangunan maupun rehabilitasi. Sarana transportasi umum berupa terminal, perlu ada perhatian untuk optimalisasi fungsi Terminal Dukuhsalam dan Terminal Adiwerna. Sarana persampahan dengan jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang hanya satu di Desa Penujah, maka perlu ada penambahan jumlah TPA untuk mengatasi volume sampah yang terangkut.

Selain itu juga kurangnya jumlah sarana pengangkut sampah berupa truk dan gerobak yang belum efektif kinerjanya. Masih ada kesenjangan antara produksi sampah dengan volume sampah yang terangkut, data di Tahun 2016 produksi sampah sebanyak 458 m kubik sedangkan volume sampah yang terangkut hanya 289,89 m kubik. Isu yang lain adalah masih tingginya kerusakan prasarana jalan kabupaten antar wilayah kecamatan. Data Tahun 2016 jalan kewenangan Kabupaten yang dalam

kondisi baik hanya ada 44,15%, kondisi sedang 13,85%, kondisi rusak 18,81% dan kondisi rusak berat 24,18%. Prasarana drainase dan sanitasi juga perlu mendapatkan perhatian khusus, karena semakin banyaknya areal pemukiman maka drainase dan sanitasi seringkali menjadi permasalahan. Adanya pembatasan kewenangan dalam pengembangan infrastruktur wilayah antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, maka perlu ada kesamaan pemahaman dan tanggungjawab dalam perencanaan dan penganggaran program kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur di wilayah.

5. Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal, jika dilihat dari delapan aspek yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, e-government sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal.

Belum ada sistem informasi yang terintegrasi sehingga sistem dan aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD belum bisa terbangun dan terkonsolidasi dalam satu jejaring. Optimalisasi sistem informasi dalam wujud e-government yang terintegrasi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam ketatalaksanaan birokrasi. Pemanfaatan teknologi sistem informasi tentunya akan mendukung kecepatan, ketepatan, kecermatan dan biaya murah dalam memberikan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dasar perlu menjadi perhatian utama, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik akan langsung mendapatkan respon dari masyarakat dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata akan memberikan kontribusi dalam mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi

hanya mengandalkan indahny bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara.

Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah khususnya di lingkup pantai utara Jawa ditunjang akses jalan tol trans Jawa yang sudah terbangun, dan dengan kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata. Isu terkait dengan budaya dan kearifan lokal adalah perlunya upaya menggali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif melalui pengembangan strategi kebudayaan sebagai sarana pembinaan mental yang berbudi luhur yang dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai tradisi, sejarah dan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi budaya, tanpa mengesampingkan upaya pelestarian dan pengembangan potensi budaya lokal.

Permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan Tahun 2019 menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019. Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 juga dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan pada periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 dan serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 adalah Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow Program.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang merupakan rencana pembangunan nasional tahun 2019 diprioritaskan pada 5 (lima) prioritas yaitu :

1. Pendidikan Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun 2015-2019. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ditujukan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2019, meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM;
4. Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
5. Ketahanan Pangan dan Energi;
6. Kesenjangan Wilayah;
7. Tata Kelola Pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, isu strategis, prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2019 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019 meliputi :

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 diarahkan untuk **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi lokal yang didukung pembangunan sarana prasarana infrastruktur untuk mewujudkan kemandirian, keunggulan dan kesejahteraan masyarakat.”**. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019 ditujukan untuk:

1. **Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat**, yang difokuskan pada :
 - a. Penyediaan akses kebutuhan dasar berupa rumah layak huni untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan.
 - b. Penyediaan akses layanan air bersih dan sanitasi untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan.
 - c. Penanganan kawasan permukiman kumuh.
 - d. Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.

- e. Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.
- f. Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan murah dan terjangkau.
- g. Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).
- h. Penyediaan anggaran bantuan sosial bagi kelompok yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan dan keagamaan tetapi memiliki kerentanan masalah sosial.
- i. Pelatihan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja dengan sasaran darai keluarga miskin.
- j. Penguatan basis data kemiskinan, yang berbasis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu dengan melibatkan swasta dan pihak lainnya.
- k. Penyediaan jaminan hidup miskin absolut dimana warga miskin absolut, yaitu tidak punya tempat tinggal milik sendiri, hidup di bantaran sungai, tidak ada yang memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga, serta sakit berat dan tidak mampu berobat. Pemerintah akan memfasilitasi jaminan rumah (jarum) bagi warga yang belum memiliki rumah, jaminan hidup (jadup) berupa uang saku setiap bulan bagi warga yang tidak produktif, serta jaminan kesehatan (jakes) bagi warga miskin yang sakit berat dan tidak termasuk sakit yang dibiayai JKN

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang difokuskan pada :

- a. Memenuhi target kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini dan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan penuntasan Angka Putus Sekolah.
- b. Penyediaan sarana prasarana sekolah yang memadai dengan melakukan pembangunan dan atau rehabilitasi ruang kelas yang sesuai standar pelayanan minimal; penyediaan Perpustakaan beserta kelengkapan buku-bukunya; dan penyediaan sanitasi sekolah yang memenuhi standar kelayakan.
- c. Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
- d. Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.
- e. Menjamin ketersediaan sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar.
- f. Mengoptimalkan cakupan pertolongan persalinan melalui fasilitas pelayanan PONEB di Puskesmas sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- g. Memenuhi target capaian kinerja cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat dan cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat.

- h. Mengoptimalkan cakupan pelayanan khusus dan pelayanan rujukan, serta cakupan call center dan jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- i. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- j. Mengoptimalkan capaian kinerja program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan bayi lahir hidup.
- k. Menjamin perlindungan perempuan dan anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *trafficking*.
- l. Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.
- m. Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
- n. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial dan layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
- o. Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana.

3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif, yang difokuskan pada :

- a. Peningkatan produksi unggul pertanian melalui optimalisasi kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi; promosi hasil produk pertanian; dan penerapan kebijakan pemanfaatan hasil produk pertanian lokal untuk berbagai acara/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- b. Pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah.
- c. Revitalisasi kelembagaan pertanian melalui penguatan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh serta difasilitasi agar kelompok memiliki Badan Hukum.
- d. Penumbuhan pelaku usaha baru sektor pertanian dan industri pendukungnya melalui sinergi industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (*backward* dan *forward linkage*), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.
- e. Pengembangan fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah; dan penciptaan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat serta berdaya saing.
- f. Peningkatan jejaring perdagangan pasar tradisional melalui kerjasama informasi harga;
- g. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat menempati sesuai dengan aturan peruntukan ruang.

- h. Peningkatan produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan serta ekonomi kreatif melalui penyusunan *roadmap* pengembangan industri lokal unggulan; kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (litbang) Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi dan penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul local.
- i. Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal untuk diadaptasi menjadi Teknologi Tepat Guna.
- j. Peningkatan produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.

4. Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah, yang difokuskan pada :

- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi) melalui penyediaan akses jalan, ruang terbuka hijau dengan sarana prasarana perekonomian yang mendukung, air bersih, dan sanitasi.
- b. Memenuhi capaian target kinerja panjang jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik sesuai standar Bina Marga.
- c. Mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan jalan kewenangan Desa dalam kondisi baik sesuai standar Bina Marga.
- d. Memenuhi capaian target kinerja sarana pendukung jalan berupa drainase dan talud yang terbangun, direhabilitasi dan berfungsi baik.
- e. Optimalisasi capaian target kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya.
- f. Optimalisasi capaian target kinerja pengembangan dan pengelolaan persampahan.
- g. Peningkatan persentase ruang terbuka terhadap luasan melalui perluasan dan penambahan jumlah taman kota; perluasan dan penambahan jumlah tempat berkumpul masyarakat sebagai sarana pengungkit ekonomi kerakyatan; dan peningkatan fasilitas kawasan GOR Tris Sanja.
- h. Pengendalian industri pertambangan dan industri B3; serta melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi.

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang difokuskan pada :

- a. Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Menerapkan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.
- d. Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Publik.
- e. Melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh OPD.
- f. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
- g. Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.

6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal, yang difokuskan pada :

- a. Menginisiasi dan mengembangkan wisata Desa dengan berbagai macam potensi dan keunikannya serta jejaring dengan Desa lainnya.
- b. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan manca negara.
- c. Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian.
- d. Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat sebagai daya tarik wisata.
- e. Melakukan promosi dan pentas seni budaya di ajang promosi nasional dan internasional.
- f. Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional, nasional dan internasional.
- g. Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadap tahun 2019 di Kabupaten Tegal. Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2019 beserta dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Keterkaitan isu strategis dan Prioritas daerah dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
1	Kemiskinan	1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	1. Penanggulangan kemiskinan	1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2	Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM	1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
3	Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	2. Penguatan daya saing ekonomi daerah 5. Ketahanan Pangan dan Energi	3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
4	Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	4. Pegelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 6. Kesenjangan Wilayah	2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5	Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	5. mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan	4. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
6	Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	2. Penguatan daya saing ekonomi daerah	3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadapi pada Tahun 2019 di Kabupaten Tegal.

Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis dapat dilihat dalam Tabel 1.2 Berikut ini.

Tabel 1.2.

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2019

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
1. Kemiskinan	1. Kemiskinan	1. Penanggulangan <i>kemiskinan</i> melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat	MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
			Program Pendidikan Anak Usia Dini;

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
			Program Pendidikan Menengah;
			Program Pendidikan Non Formal;
			Program Pendidikan Luar Biasa;
			STRATEGI II: MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			STRATEGI III: MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN UMKM
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
			Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
			Program pengembangan industri kecil dan menengah
			Program Penataan Struktur Industri
2. Pelayanan Dasar Pendidikan 3. Derajat kesehatan masyarakat 4. Pengangguran	2. Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pendidikan Anak Usia Dini;
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
			Program Pendidikan Menengah;
			Program Pendidikan Non Formal;
			Program Pendidikan Luar Biasa;
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Program Pengawasan Obat dan Makanan
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit mata;
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
5. Rendahnya Daya Saing Ekonomi Lokal	3. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	3. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;
			Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.
			Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
			Program Penataan Struktur Industri.
6. Belum Optimalnya Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	4. Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Program rehabilitasi/peme liharaan Jalan dan Jembatan
			Program Pembangunan turap/talud/bron jong
			Program rehabilitasi/peme liharaan talud /bronjong
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penataan Administrasi Kependudukan
			Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;
			Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan.
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
			Program Peningkatan Pelayanan Publik
8. Peningkatan daya saing pariwisata dan pengembangan destinasi wisata lokal	6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
			Program Pengembangan Kemitraan.

Permasalahan Pembangunan	Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
			Program Pengembangan Nilai Budaya
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2. Tujuan

Secara umum tujuan disusunnya KUA Tahun 2019 adalah :

- a. Sebagai upaya terwujudnya kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tegal antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
- b. Sebagai upaya tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat .
- c. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD.

3. Dasar Hukum

Landasan penyusunan KUA Kabupaten Tegal Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019;

4. Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2019

Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tegal Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya
2.3	Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan (Tahun 2019)
BAB III ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD	
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD
3.2	Laju Inflasi
3.3	Pertumbuhan PDRB
3.4	Lain - Lain Asumsi
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH	
4.1	Pendapatan Daerah
4.2	Belanja Daerah
4.3	Pembiayaan Daerah
BAB V PENUTUP	

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di kota Slawi. Terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura). Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Pembagian kecamatan di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
di Kabupaten Tegal Tahun 2017

Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
01. Margasari	8.684	13
02. Bumijawa	8.855	18
03. Bojong	5.852	17
04. Balapulang	7.491	20
05. Pagerbarang	4.300	13
06. Lebaksiu	4.096	15
07. Jatinegara	7.962	17
08. Kedungbanteng	8.762	10
09. Pangkah	3.551	23
10. Slawi	1.363	10 (5 desa, 5 kelurahan)
11. Dukuhwaru	2.658	10
12. Adiwerna	2.386	21
13. Dukuhturi	1.747	18
14. Talang	1.837	19
15. Tarub	2.682	20
16. Kramat	3.849	20 (19 desa, 1 kelurahan)
17. Suradadi	5.573	11
18. Warureja	6.231	12
Jumlah	87.879	281 desa / 6 kelurahan

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2017

Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108°57'06" BT - 109°21'30" BT dan 6°50'41" LS - 7°15'03" LS, dengan luas wilayah 87.879 ha atau 878,79 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang

Secara geografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 katagori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja; (2) daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah; dan (3) daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 m dpl, kawasan dengan ketinggian 500-750 m dpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 m dpl.

Ditinjau dari aspek morfologi, wilayah Kabupaten Tegal terbagi atas daerah dataran rendah, daerah perbukitan landai, daerah perbukitan bergelombang, dan daerah perbukitan terjal.

Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas tanah aluvial, litosol, regosol, dan grumosol. Sedangkan berdasarkan iklim, Kabupaten Tegal beriklim tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata berkisar 78 persen; tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh area non terbangun. Lahan sawah dapat ditemui di daerah Utara kabupaten yang relatif datar; sementara daerah Selatan yang relatif berbukit didominasi oleh hutan. Dua jalur regional utama (pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto) menjadi generator utama pertumbuhan wilayah.

Luasan lahan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kecenderungan yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada

daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan penanganannya. Luas Lahan Pertanian Yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012–2032 yaitu :

- a. Kawasan Pertanian Lahan Basah : 35.946 Hektar
- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering : 6.630 Hektar

Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kota Tegal, khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.

Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto. Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditas unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Tegal memiliki banyak komoditas unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian. Diantara komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Tegal, terdapat beberapa komoditas yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi sampai ke tingkat provinsi dan nasional.

Komoditas-komoditas khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tegal diantaranya dari sektor pertanian yaitu padi, jagung, sayuran antara lain bawang merah, cabai, kentang dan kubis, dari sektor peternakan yaitu sapi perah, sapi potong, domba, ayam ras pedaging dan itik serta produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya kelompok industri kimia dan kertas, kelompok logam mesin dan elektronik, dan kelompok industri agro dan hasil hutan. Komoditas-komoditas tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditas telah dapat bersaing di pasar internasional.

1.2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 diproyeksikan adalah 1.433.515 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.879 ha, dan kepadatan penduduk Kabupaten Tegal tahun 2017 adalah ± 1.631 jiwa/km². sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Di Kabupaten Tegal Pada Tahun 2017

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
01. Margasari	86,84	95.965	1.105
02. Bumijawa	88,55	84.660	956
03. Bojong	58,52	62.142	1.062
04. Balapulang	74,91	82.142	1.097
05. Pagerbarang	43,00	52.746	1.227
06. Lebaksiu	40,95	84.040	2.052
07. Jatinegara	79,62	54.191	681
08. Kedungbanteng	87,62	40.483	462
09. Pangkah	35,51	101.348	2.854
10. Slawi	13,63	72.225	5.299
11. Dukuhwaru	26,58	59.884	2.253
12. Adiwerna	23,86	119.877	5.024
13. Dukuhturi	17,48	89.123	5.099
14. Talang	18,37	102.312	5.570
15. Tarub	26,82	78.566	2.929
16. Kramat	38,49	111.710	2.902
17. Suradadi	55,73	81.709	1.466
18. Warureja	62,31	60.392	969
2 0 1 7	878,79	1.433.515	1.631
2 0 1 6	878,79	1.429.386	1.626
2 0 1 5	878,79	1.424.890	1.621
2 0 1 4	878,79	1.420.132	1.616
2 0 1 3	878,79	1.415.009	1.610

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2018

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) di tahun 2017 mencapai 949.810 orang,

jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 483.705. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) tahun 2017 mencapai 23,49% artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 23 penduduk tidak produktif, sebagaimana dalam Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3.
Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2013-2017

Usia	2013	2014	2015	2016	2017*
0 - 4	124.326	131.184	124.234	127.359	125.515
5 - 9	121.823	130.506	125.050	130.038	129.132
10 - 14	120.519	129.575	129.197	132.020	131.447
15 - 19	116.217	128.175	102.001	122.982	121.999
20 - 24	94.062	113.861	86.494	112.441	113.627
25 - 29	125.951	103.983	117.547	107.145	108.147
30 - 34	126.979	109.998	118.285	106.826	105.112
35 - 39	117.498	106.628	107.324	105.616	104.683
40 - 44	109.572	93.223	105.301	93.835	93.783
45 - 49	98.700	87.375	92.621	87.240	87.274
50 - 54	90.017	80.301	82.794	82.826	83.794
55 - 59	61.715	66.021	70.648	70.870	72.930
60 - 64	38.257	48.733	46.182	55.728	58.461
65 +	73.775	90.569	117.202	94.460	97.611
Jumlah	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2018

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 adalah 1.433.515 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 712.054 jiwa dan perempuan 720.433 jiwa sehingga sex ratio mencapai 98,84. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2013-2017 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017

Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
1. Margasari	47.501	48.337	95.838	98,3
2. Bumijawa	42.160	42.389	84.549	99,5
3. Bojong	30.168	31.904	62.072	94,6
4. Balapulang	40.547	41.493	82.040	97,7
5. Pagerbarang	26.136	26.548	52.684	98,4
6. Lebaksiu	40.936	43.016	83.952	95,2
7. Jatinegara	26.770	27.363	54.133	97,8
8. Kedungbanteng	20.307	20.133	40.440	100,9
9. Pangkah	50.602	50.462	101.064	100,3
10. Slawi	35.207	36.588	71.795	96,2

Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
11. Dukuhwaru	29.424	30.253	59.677	97,3
12. Adiwerna	60.130	59.621	119.751	100,9
13. Dukuhturi	44.763	44.266	89.029	101,1
14. Talang	50.949	50.609	101.558	100,7
15. Tarub	39.358	38.908	78.266	101,2
16. Kramat	54.738	55.853	110.591	98,0
17. Suradadi	40.648	40.975	81.623	99,2
18. Warureja	30.169	30.155	60.324	100,0
2 0 1 7	712.054	720.433	1.433.515	98.84
2 0 1 6	710.513	718.873	1.429.386	98.84
2 0 1 5	708.316	716.574	1.424.890	99,00
2 0 1 4	706.001	714.131	1.420.132	98.86
2 0 1 3	703.494	711.515	1.415.009	98,87

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2018

2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2017 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 30.044.412.28 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2017 mencapai Rp. 22.371.534,53 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya kluster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthur, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat danteh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil – hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Hal tersebut dibuktikan pada saat kondisi makro ekonomi Indonesia yang bergejolak pada tahun 2015 tidak terlalu mempengaruhi kondisi makro ekonomi Kabupaten Tegal. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara

ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun. Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Tabel 2.5
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tegal (Juta Rupiah)

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017*	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.468.079,63	16,7	3.411.486,14	14,89	3.869.869,62	15,13	4.114.690,91	14,84	3.755.551,54	12,50
B	Pertambangan dan Penggalian	794.613,80	3,83	1.025.944,03	4,48	1.138.617,76	4,45	1.253.014,46	4,52	1.367.020,76	4,55
C	Industri Pengolahan	6.554.374,66	31,56	7.453.897,72	32,53	8.496.555,92	33,22	9.269.703,44	33,43	10.431.419,94	34,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.634,29	0,07	14.272,17	0,07	14.773,50	0,06	15.516,37	0,06	18.026,65	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.212,93	0,05	9.004,16	0,04	9.484,63	0,04	9.922,55	0,04	12.017,76	0,04
F	Konstruksi	1.464.548,79	7,81	1.557.777,79	7,5	1.774.421,40	7,74	1.935.916,03	7,57	2.292.388,66	7,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.160.619,53	16,85	3.423.526,04	16,49	3.682.696,94	16,07	3.999.444,07	15,64	4.725.986,05	15,73
H	Transportasi dan Pergudangan	464.335,17	2,48	512.243,17	2,47	598.708,65	2,61	673.981,93	2,63	814.203,57	2,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	786.095,88	4,19	844.799,13	4,07	949.107,57	4,14	1.069.660,33	4,18	1.282.896,40	4,27
J	Informasi dan Komunikasi	521.047,92	2,78	553.765,22	2,67	600.478,85	2,62	645.062,14	2,52	799.181,37	2,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	459.825,89	2,45	489.698,89	2,36	534.264,72	2,33	593.103,79	2,32	688.017,04	2,29
L	Real Estat	315.344,41	1,68	331.638,13	1,6	370.106,44	1,62	409.786,78	1,60	495.732,80	1,65
M	Jasa Perusahaan	68.609,68	0,37	80.845,19	0,39	89.163,90	0,39	103.454,47	0,39	126.186,53	0,42
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	467.582,15	2,49	497.798,49	2,4	534.057,68	2,33	583.200,27	2,28	675.999,28	2,25
O	Jasa Pendidikan	867.566,41	4,63	1.032.184,00	4,97	1.171.260,42	5,11	1.288.282,96	5,04	1.685.491,53	5,61
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149.174,81	0,8	162.101,67	0,78	186.174,35	0,81	198.743,34	0,78	234.346,42	0,78
Q	Jasa lainnya	386.144,28	2,06	438.870,06	2,11	510.444,00	2,23	546.165,87	2,13	639.945,98	2,13
	Total	18.756.760,13	100	20.765.592,21	100	22.916.470,94	100	25.577.284,21	100	30.044.412,28	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2018

Tabel 2.6.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013- 2017 atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tegal (Juta Rupiah)

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017*	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.878.663,32	15,95	2.647.364,02	13,97	2.831.399,07	14,93	2.953.344,86	13,80	2.657.779,26	11,88
B	Pertambangan dan Penggalian	733.207,60	4,06	782.937,77	4,13	794.797,71	4,19	848.474,09	3,99	865.791,73	3,87
C	Industri Pengolahan	5.478.580,85	30,35	5.994.165,58	31,62	6.314.825,65	33,31	6.802.682,83	31,99	7.313.367,34	32,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.264,96	0,08	14.664,27	0,08	14.623,63	0,08	14.677,59	0,07	15.446,87	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.918,24	0,05	9.066,72	0,05	9.294,84	0,05	9.413,22	0,04	8.817,45	0,04
F	Konstruksi	1.418.500,50	7,86	1.483.094,95	7,82	1.564.698,24	8,25	1.648.467,47	7,75	1.780.801,59	7,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.167.242,71	17,54	3.333.113,77	17,58	3.468.214,13	18,29	3.648.221,49	17,16	3.872.572,30	17,31
H	Transportasi dan Pergudangan	505.815,32	2,8	552.825,09	2,92	600.269,73	3,17	645.314,42	3,03	691.291,07	3,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	791.786,17	4,39	846.713,92	4,47	907.506,46	4,79	983.764,89	4,63	1.047.003,95	4,68
J	Informasi dan Komunikasi	583.970,08	3,23	665.456,39	3,51	692.670,72	3,65	745.335,96	3,50	823.285,16	3,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	397.941,26	2,2	407.637,25	2,15	442.095,37	2,33	473.875,08	2,23	512.316,04	2,29
L	Real Estat	320.938,30	1,78	340.514,94	1,8	340.514,94	1,80	393.993,84	1,85	425.065,71	1,90
M	Jasa Perusahaan	71.113,47	0,39	76.073,96	0,4	76.873,96	0,41	91.048,23	0,43	96.199,08	0,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	412.744,48	2,29	413.494,01	2,18	415.894,01	2,19	450.068,43	2,12	514.553,22	2,30
O	Jasa Pendidikan	725.443,05	4,02	795.930,56	4,2	795.930,56	4,20	931.281,14	4,38	1.042.529,57	4,66
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136.904,74	0,76	149.536,60	0,79	148.536,60	0,78	166.751,02	0,78	178.975,03	0,80
Q	Jasa lainnya	407.570,03	2,26	443.165,91	2,34	443.165,91	2,34	477.002,67	2,24	525.739,16	2,35
	Total	18.053.605,08	100	18.955.755,71	100	18.958.363,83	100	21.265.717,23	100	22.371.534,53	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2018

b. Struktur Ekonomi PDRB Tahun Dasar 2010

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tegal telah bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan, kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Konstruksi, dan kategori Jasa Pendidikan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 8 persen

Tabel 2.7
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017

Lapangan Usaha/Industry	2013	2014	2015	2016	2017*
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,70	14,89	15,13	12,50	15,70
Pertambangan dan Penggalian	3,83	4,48	4,45	4,55	4,17
Industri Pengolahan	31,56	32,53	33,22	34,72	32,56
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Konstruksi	7,50	7,74	7,57	7,63	7,56
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,49	16,07	15,64	15,73	16,00
Transportasi dan Pergudangan	2,47	2,61	2,64	2,71	2,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,07	4,14	4,18	4,27	2,32
Informasi dan Komunikasi	2,67	2,62	2,52	2,66	2,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,36	2,33	2,32	2,29	2,32
Real Estat	1,60	1,62	1,60	1,65	1,60
Jasa Perusahaan	0,39	0,39	0,40	0,42	0,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,40	2,33	2,28	2,25	2,33
Jasa Pendidikan	4,97	5,11	5,04	5,61	5,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,81	0,78	0,78	0,78
Jasa lainnya	2,11	2,23	2,14	2,13	2,15
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat

sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan PDRB berdasar harga konstan, yang mengindikasikan pertumbuhan produksi total pada suatu daerah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal sedikit mengalami perlambatan karena pengaruh krisis global pada 2008. Setelah pengaruh krisis melemah, pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil selama dua tahun terakhir dan menunjukkan tren yang bagus. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6%. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang belum dioptimalkan, karena dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis dan keunggulan komparatif yang nyata pada sektor industri pengolahan dan perdagangan, seharusnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat mencapai 6%.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tahun 2016 mencapai 6,37 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,45 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori jasa pendidikan sebesar 9,43 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif.

Adapun kategori-kategorilainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategoriJasa Perusahaan mencatat sebesar 8,43 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 7,73 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,40 persen, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,93 persen, kategoriJasa Lainnya sebesar 4,37 persen, kategori Informasi dan komunikasi sebesar 7,60 persen, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,75 persen, kategoriReal Estat sebesar 7,83 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,19 persen, kategori Konstruksi sebesar 5,35 persen, kategori Pengadaan listrik dan Gas sebesar 0,37 persen, kategori Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,40 persen, kategoriJasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,19 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,27 persen, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,96 persen.

Tabel 2.8

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,90	1,51	4,30	2,78	3,63
B	Pertambangan danPenggalian	4,92	5,98	6,17	2,10	6,75
C	Industri Pengolahan	8,57	12,57	8,13	6,66	7,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,53	7,31	4,24	1,65	0,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,43	0,67	3,91	0,30	1,27
F	Konstruksi	5,70	4,32	4,51	5,54	5,35

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,55	4,45	5,17	4,12	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan	5,20	9,29	9,11	8,76	7,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,14	2,26	6,94	7,18	8,40
J	Informasi dan Komunikasi	10,25	9,19	8,82	9,00	7,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,16	3,54	7,29	7,19
L	Real Estat	3,49	4,17	6,10	7,30	7,83
M	Jasa Perusahaan	5,26	11,54	8,10	9,23	8,43
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,10	2,04	0,76	5,10	2,96
O	Jasa Pendidikan	17,47	8,91	9,72	6,92	9,43
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,30	5,70	8,50	4,98	6,93
Q	Jasa lainnya	0,99	9,31	8,73	3,13	4,37
Produk Domestik Regional Bruto		5,23	5,23	6,73	5,03	6,37

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

d. PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku tahun 2011 sebesar Rp.10.830.000,- dan meningkat hingga mencapai Rp19.400.000,- pada tahun 2016. Tingkat pendapatan per kapita menurut lapangan usaha yang dominan pada tahun 2016 adalah pada industri pengolahan mencapai Rp.6.490.000,- kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.2.880.000,- dan sektor perdagangan dan eceran sebesar Rp.1.990.000,-. Hal tersebut sesuai dengan potensi perekonomian Kabupaten Tegal yang ditopang oleh tiga sektor utama tersebut. Secara umum, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tegal berada pada tren yang baik dan stabil mengalami peningkatan sebagaimana Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9

PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) 2012 -2016

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,26	2,45	2,40	2,72	2,88
B	Pertambangan dan Penggalian	0,52	0,56	0,72	0,80	0,88
C	Industri Pengolahan	4,05	4,63	5,25	5,96	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	1,04	1,10	1,25	1,36	1,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,24	2,42	2,59	2,81	2,99
H	Transportasi dan Pergudangan	0,33	0,36	0,42	0,47	0,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,56	0,60	0,67	0,75	0,83
J	Informasi dan Komunikasi	0,37	0,39	0,42	0,45	0,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,33	0,35	0,38	0,42	0,45
L	Real Estat	0,22	0,23	0,26	0,29	0,32
M	Jasa Perusahaan	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08

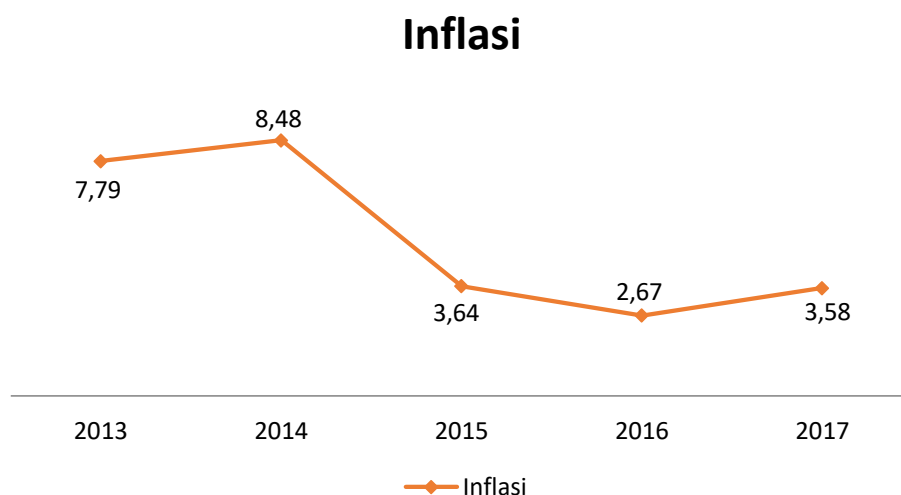
Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Laminan Sosial Waiih	0,33	0,35	0,38	0,41	0,43
O	Jasa Pendidikan	0,62	0,73	0,82	0,90	0,99
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,11	0,11	0,13	0,14	0,15
Q	Jasa lainnya	0,27	0,31	0,36	0,38	0,41
ProdukDomestik Regional Bruto		12,28	13,31	14,68	16,14	19,40

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

e. Tingkat Inflasi

Selama tahun 2017 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mencapai 3,58%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,67%. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuanganyang selama tahun kalender 2017 mencapai inflasi 5,75%; disusul kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar 5,47%; kelompok sandang 2,87%; kelompok kesehatan 2,27%; kelompok Bahan Makanan sebesar 2,05%; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 1,96%; dan terakhir kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 1,86%.

Kenaikan indeks pada kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangandikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Sarana dan Penunjang Transport yang mengalami inflasi sebesar 10,62%; sub kelompok Komunikasi dan Pengiriman yang mengalami inflasi sebesar 6,01%; dan sub kelompok Transport yang mengalami inflasi sebesar 5,21%. Adapun Kenaikan indeks pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar, utamanya dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan, dan Air, yang mengalami inflasi sebesar 16,87%, dan hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik yang berlangsung selama 6 bulan. Sedangkan sub kelompok yang mengalami penurunan indeks yakni sub kelompok bumbu-bumbuan yang turun sebesar 24,74%; dan sub kelompok Minuman tidak beralkohol yang turun sebesar 1,36%.



Gambar 2.1. Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2018

f. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 141.800 jiwa atau 9,9% terhadap total jumlah penduduk. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2015-2016), di mana pada tahun 2015 mencapai 143.540 jiwa atau 10,09%, dan tahun 2016 mencapai 144.200 jiwa atau 10,1%.

Berikut adalah Gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2013- 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Miskin	149.800	140.308	143.540	144.200	141,800
2.	Jumlah Penduduk	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515
3.	Persentase Penduduk miskin terhadap jumlah penduduk	10,58	9,88	10,07	10,09	9,90

Sumber : Bappeda Tegal Tahun, 2018

g. Angka Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- b. Pengetahuan (*knowledge*)
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

IPM Kabupaten Tegal Tahun 2017 meningkat 0,6 dibanding Tahun sebelumnya, yang didukung oleh peningkatan semua komponennya. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru sebagaimana dijelaskan diatas pada tahun 2013 – 2017 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11

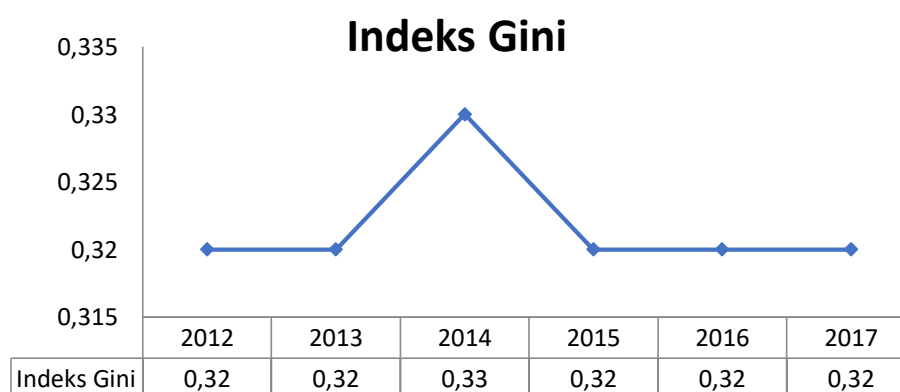
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal Metode Baru Tahun 2013–2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	IPM	63,50	64,10	65,04	65,84	66,44
1	- Angka Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,80	70,90	71,02	71,14
2	- Harapan Lama Sekolah (EYS)	11,63	11,99	12	12,01	12,06
3	- Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	5,85	5,93	6,30	6,54	6,55
4	-Pengeluaran (RibuDupiah/orang/tahun)	8.001	8.050	8.367	8.709	9.136

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2018

h. Indeks Gini

Indeks merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal 2012-2017 meningkat yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2012 - 2017 sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.2 di bawah ini



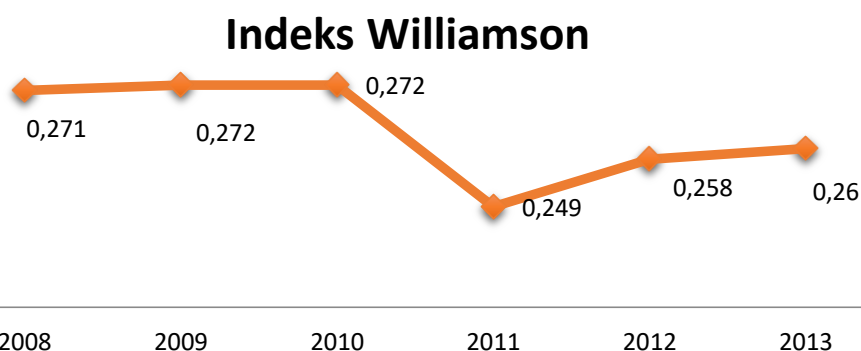
Gambar 2.2. Indeks Gini Kabupaten Tegal Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

i. Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah indeks untuk mengukur ketimpangan daerah. Indeks ini adalah koefisien variasi terbobot dari proporsi populasi di tiap kecamatan dibandingkan dengan total populasi kabupaten. Indeks yang semakin kecil

menunjukkan bahwa ketimpangan semakin berkurang, sedangkan semakin besar nilai indeks menunjukkan bahwa ketimpangan semakin bertambah. Pada lima tahun terakhir Indeks Williamson Kabupaten Tegal cukup fluktuatif, dimana Tahun 2008 pada angka 0,271, Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebesar 0,272, kemudian Tahun 2011 menurun pada angka 0,249, Tahun 2012 naik pada angka 0,258 dan tahun 2013 kembali naik pada angka 0,26 sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3. Indeks Williamson Kabupaten Tegal Tahun 2008-2013

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

Dari data indeks Williamson tersebut, Kabupaten Tegal masih bisa dikategorikan dalam tingkat ketimpangan rendah. Meskipun demikian, tren yang terjadi adalah angka Indeks Williamson cenderung naik; yang mengimplikasikan bahwa ketimpangan wilayah cenderung meningkat. Hal ini perlu diwaspadai, bahwa ketimpangan wilayah yang masuk dalam katagori rendah seharusnya tidak boleh melenakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan, sehingga arah pembangunan harus berorientasi pada pemerataan dan tidak hanya pada pertumbuhan saja.

j. Investasi

Jumlah realisasi proyek PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 796 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp.566.881.900.000, dan proyek PMA tahun 2017 sebanyak 4 proyek dengan jumlah investasi sebesar Rp.1.243.150.300.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12 Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Tegal Tahun 2013 -

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi
2013	3.046	774.269.500.000	1	40.000.000.000
2014	4.658	642.443.030.153	2	70.000.000.000
2015	4.806	724.380.209.176	2	226.216.300
2016	3.055	765.769.500.000	2	43.000.000.000
2017	3.060	785.775.500.000	3	46.000.000.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, Tahun 2018

k. Ketenagakerjaan

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih,

seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerjaan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja atau mencari kerja. Tahun 2017 TPAK di Kabupaten Tegal mencapai 81%, angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 63,17%. Kondisi penduduk usia produktif (15-64tahun) menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerjadi Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebagaimana Tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2.13.

**Penduduk Usia Produktif (15-64Tahun) di Kabupaten Tegal
Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2013 -2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk usia 15+	978.968	1.105.008	1.119.139	1.424.891	1.047.421
2	Angkatan Kerja	615.630	900.214	891.014	900.214	15.551
3	Bukan Angkatan Kerja	363.338	207.704	228.125	-	-
4	Bekerja	572.937	846.200	837.206	712.528	4.555
5	Pengangguran	42.693	53.943	53.808	187.686	11.522
6	TPAK (Tingkat partisipasi angkatan kerja)	62,89%	81,46%	79,61%	63,17%	81%
7	TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)	93,07%	92,22%	93,96%	53,73%	97,10%
8	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	4,36%	6,37%	6,03%	54,7%	5,47%
9	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	13.107	10.226	9.432	11.788	6.007
10	Penempatan AKL	5.301	1.531	4.910	729	120
11	Penempatan AKAD	11.068	3262	2800	91	231
12	Penempatan AKAN	6.850	3325	371	500	653
13	Jumlah Pencaker/Pembuat AKI	13.107	10.226		11.788	16.077

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal tahun 2018

I. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk

mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Selama tahun 2017 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 86,76 naik 0,27 poin dibanding IPG tahun 2015. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM. Sebagaimana Tabel 2.14 di bawah ini.

Tabel 2.14.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tahun 2013-2017

Daerah	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Tegal	85,78	86,76	87,03	86,76	86,76

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2017

m. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui IDG memperlihatkan penurunan 25,91 poin dari 77,06 ditahun 2015 menjadi 51,16 ditahun 2017. IDG di Kabupaten Tegal tahun 2013 yaitu 51,91 dan tahun 2014 meningkat menjadi 68,02. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam Tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15.

**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tegal
Tahun 2013-2017**

Daerah	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Tegal	51,91	68,02	77,06	51,15	51,15

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2017

BAB III

ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah dalam rangka merealisasikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2019. Pelaksanaan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator pokok perekonomian daerah. Untuk itu dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal Tahun 2019 dapat dijelaskan asumsi-asumsi dasar yang merupakan indikator pokok perekonomian daerah yang dapat berpengaruh secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Perkiraan Jumlah Penduduk

Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan tren dari tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal

Komponen	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
JumlahPenduduk	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515	
r (growth rate)		0,0036	0,0034	0,0032	0,0029	0,0033

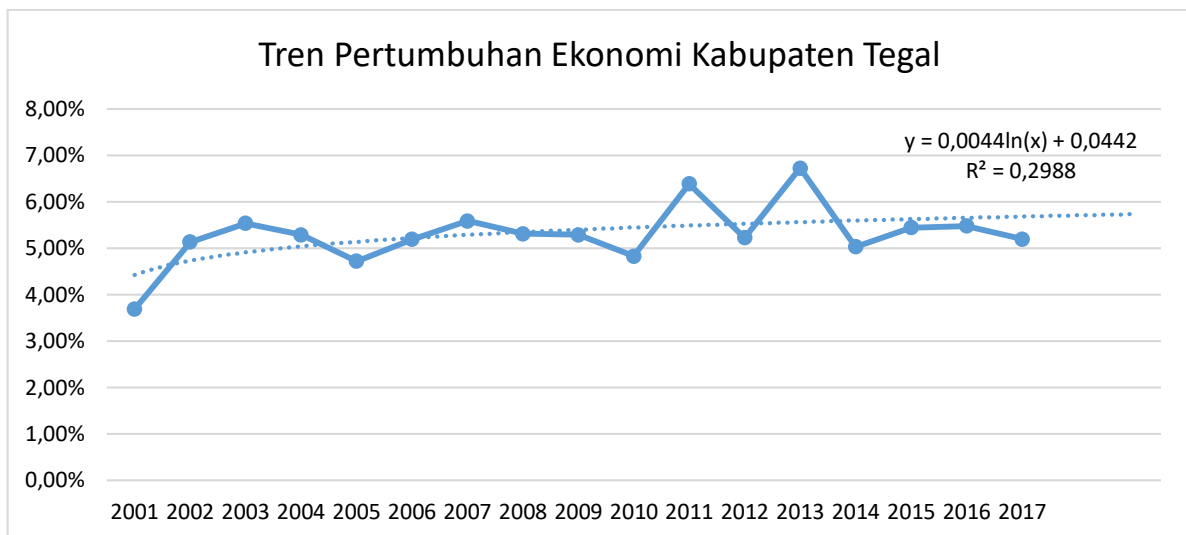
Dengan angka rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,0033, maka perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2019 ditetapkan sebanyak 1.442.859 jiwa.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono 1999). Sehingga persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut.

Kuznets dalam M.L Jhingan (2002) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal berada dalam tren yang menaik dan selalu tumbuh positif tiap tahunnya. Secara lebih lengkap, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal berdasar kurun waktu 2001-2017 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2001-2017

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, data series

Dari tren tersebut, maka dapat ditarik proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Proyeksi yang digunakan adalah proyeksi logaritmis dimana proyeksi ini adalah proyek yang paling tepat digunakan ketika ada data yang meningkat/menurun dengan cepat, untuk selanjutnya kembali mengikuti tren awal. Logaritma yang digunakan adalah logaritma naturalis, dengan basis logaritma yaitu 2.71828182845904. Berdasarkan tren tersebut, didapat persamaan garis pertumbuhan ekonomi yaitu $y = 0,0044 (\ln) x + 0,0442$. Selanjutnya, dengan mempergunakan persamaan tersebut, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2019 adalah 5,72%.

Dari gambaran tersebut di atas, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,72% ± 0,25. Target pertumbuhan ini memang lebih kecil daripada target dalam RPJMD, tetapi relatif sudah progresif jika dibandingkan dengan kondisi eksisting.

Dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,72% dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2017 sebesar Rp. 22.371.534.530.000,-, maka proyeksi PDRB Kabupaten Tegal pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 24.996.304.460.248,-.

3. Kebutuhan Investasi

Berdasarkan data PDRB dan perkiraan pertumbuhan ekonomi, maka akan dapat diperkirakan kebutuhan investasi pada tahun 2019 dengan asumsi sebagai berikut:

- ICOR: 4 (sesuai target Pemerintah Pusat)
- Pertumbuhan ekonomi: 5,72%
- PDRB atas dasar harga konstan: Rp. 24.996.304.460.248,-

Dengan demikian, dibutuhkan total investasi baru sebesar 22,88% dari total PDRB atau sebesar Rp. 5.719.154.460.505,-. Dengan asumsi bahwa APBD (Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes, dan Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol sebesar Rp. 1.765.449.653.536,-) adalah investasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tegal, maka dibutuhkan investasi dari pihak lain sebesar Rp. 3.953.704.806.969,- yang dapat

dipenuhi dari APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, pihak swasta, ataupun sumber investasi lain.

4. Produktivitas Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal disuatu daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk, dan dapat dianggap mewakili produktivitas penduduk di suatu wilayah. Secara detail, PDRB Perkapita Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) Tahun 2010-2015

Komponen	2013	2014	2015	2016	2017	2019 (proyeksi)
PDRB (juta)	18.050.291,97	18.958.363,83	19.990.819,93	21.086.125,01	22.371.534,53	24.996.304,46
Jumlah penduduk	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.442.859
PDRB Perkapita (juta/org/thn)	12,76	13,35	14,03	14,75	15,61	17,32

Sumber :BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2018

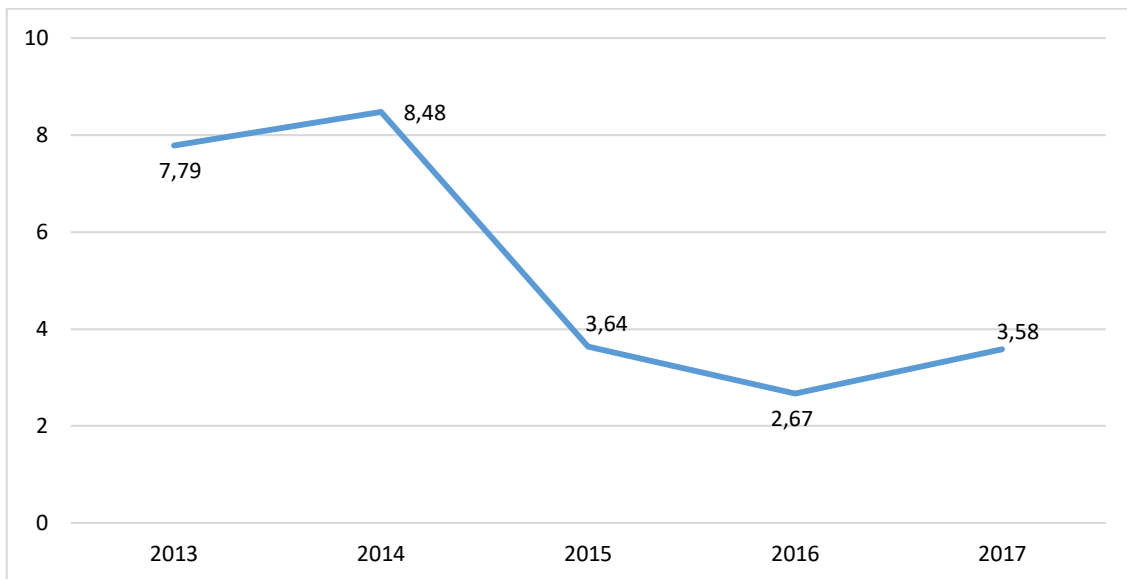
Secara umum, produktivitas perkapita penduduk Kabupaten Tegal memiliki tren yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik. Dengan memperkirakan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 1.442.859 jiwa dan PDRB Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sebesar Rp. 24.996.304.460.248,-, maka perkiraan PDRB Perkapita pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 17,32 juta rupiah.

5. Inflasi

Dari sisi inflasi, dalam arah kebijakan tahun 2017 laju inflasi ditetapkan sebesar 5,75% - 6,25%. Namun realisasinya adalah sebesar 3,58%. Selama tahun 2017 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mencapai 3,58 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,67 persen. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang selama tahun kalender 2017 mencapai inflasi 5,75 persen; disusul kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar 5,47 persen; kelompok sandang 2,87 persen; kelompok kesehatan 2,27 persen; kelompok Bahan Makanan sebesar 2,05 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 1,96 persen; dan terakhir kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 1,86 persen.

Kenaikan indeks pada kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Sarana dan Penunjang Transport yang mengalami inflasi sebesar 10,62 persen; sub kelompok Komunikasi dan Pengiriman yang mengalami inflasi sebesar 6,01persen; dan sub kelompok Transport yang mengalami inflasi sebesar 5,21 persen. Adapun Kenaikan indeks pada kelompok

Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar, utamanya dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan, dan Air, yang mengalami inflasi sebesar 16,87 persen, dan hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik yang berlangsung selama 6 bulan. Sedangkan sub kelompok yang mengalami penurunan indeks yakni sub kelompok bumbu-bumbuan yang turun sebesar 24,74 persen; dan sub kelompok Minuman tidak beralkohol yang turun sebesar 1,36 persen.



Gambar 3.2. Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2013-2017

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2018

Dengan mempertimbangkan tren kondisi eksisting dan target RPJMD, maka laju inflasi pada tahun 2018 ditargetkan $4,5\% \pm 0,25$. Tingkat tersebut cukup moderat mengingat prediksi kenaikan harga yang dipengaruhi oleh elemen pokok seperti harga bahan bakar minyak dan pertumbuhan konsumsi nasional berimbang langsung pada tingkat inflasi daerah. Pada tahun 2019 juga akan dilangsungkan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang kemungkinan akan menaikkan inflasi. Keterlibatan langsung pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menyusun kebijakan sangat diperlukan guna menjaga stabilitas harga yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Target tersebut dapat tercapai jika terdapat stabilitas harga barang dan jasa terjaga.

6. Pengangguran Terbuka

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah

bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja atau mencari kerja. Tahun 2017 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tegal mencapai 81%. Angka ini menunjukkan kemajuan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 63,17%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017 (data tahun 2016 tidak tersedia dari BPS). Secara umum, gap antara TPT Kabupaten Tegal dengan TPT Provinsi Jawa Tengah menjadi menurun di tahun 2017. Meskipun demikian, tingkat TPT yang mencapai 7,33% masih relatif tinggi; bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2012.

Permasalahan tingkat pengangguran terbuka menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk dapat segera mengambil langkah kebijakan dengan memperluas kesempatan kerja. Kondisi ini dapat tercapai apabila didukung oleh iklim investasi yang kondusif dan penyerapan anggaran yang optimal. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah rendahnya kualitas pekerja. Rendahnya kualitas pekerja disebabkan oleh produktivitas dan tingkat pendidikan rendah. Di sisi lain, ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada menyebabkan perusahaan/industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh masih relatif sedikitnya angkatan kerja yang memperoleh pelatihan dan mempunyai sertifikat kompetensi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan daya saing tenaga kerja menjadi lemah. Oleh karena itu isu ini masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Daerah. Penyediaan anggaran untuk pelatihan-pelatihan siap kerja bagi angkatan kerja baru, perlu lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada.

7. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 sebanyak 140.308 jiwa atau 9,87% terhadap total jumlah penduduk. Jumlah ini selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan 2016 yang menembus 10%, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebanyak 141.800 jiwa atau 9,90% dari total penduduk.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2013-2017, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2010- 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Miskin	149.800	140.308	143.540	144.200	141,800
2.	Jumlah Penduduk	1.415.009	1.420.132	1.424.890	1.429.386	1.433.515
3.	Persentase Penduduk miskin terhadap jumlah penduduk	10,58	9,88	10,07	10,09	9,90

Kenaikan jumlah penduduk miskin ini terjadi karena program pengentasan kemiskinan diprioritaskan pada penduduk termiskin di Kab. Tegal (yang ditunjukkan dengan Indeks P1 dan Indeks P2 yang kecil; yang berarti bahwa penduduk miskin yang ada tinggal membutuhkan sedikit pengungkit untuk dapat mentas). Penambahan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015-2016 relatif kecil, yang menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Tegal tidak begitu parah kondisinya (mengacu pada indeks P1 dan indeks P2). Kesimpulan yang dapat diambil adalah pembangunan berjalan pada arah yg benar. Prioritas pembangunan yg menysasar penduduk termiskin sudah memberikan hasil. Pembangunan belum tuntas, dan perlu dilanjutkan.

Dengan kondisi dan tren tersebut, maka asumsi penurunan tingkat kemiskinan penduduk di tahun 2019 ditetapkan pada kisaran 9,25% melalui peningkatan dan perluasan intervensi program penanggulangan kemiskinan, afirmasi pembangunan wilayah tertinggal dengan dukungan program percepatan (*quick wins*), dan penguatan sistem perlindungan dan jaminan sosial.

8. Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana alam

Kejadian luar biasa dan bencana alam merupakan kejadian yang tidak kita inginkan bersama, namun berdasarkan pengalaman sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal mempunyai potensi bencana alam yang disebabkan oleh aktifitas gunung Slamet, bencana angin puting beliung dan gempa serta tanah longsor akibat kondisi cuaca, serta serangan hama pada wilayah pertanian. Pelaksanaan APBD 2019 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta antisipasi terhadap kejadian luar biasa dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan.

9. Keamanan dan Ketentraman

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Keamanan dan ketertiban tercermin dari tingkat gejolak yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif dalam mendorong kegiatan ekonomi daerah. Pada Tahun 2019 di Kabupaten Tegal akan diselenggarakan Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden. Kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden diharapkan dapat terselenggaranya dengan aman dan tertib. Penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat Kabupaten Tegal di Tahun 2019 justru diharapkan dapat memberikan stimulus pergerakan ekonomi lokal. Dalam iklim demokrasi yang sedang berkembang maka gejolak dalam masyarakat secara umum tercermin dari adanya kejadian demonstrasi di Kabupaten Tegal. Tingkat demonstrasi di Kabupaten Tegal secara umum masih dapat terkendali dengan baik sehingga stabilitas keamanan dan ketentraman akan tercapai apabila ada kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan aparatur pemerintah.

10. Rangkuman Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD

Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dan Sosial Kabupaten Tegal pada tahun 2019 dapat disarikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3

Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dan Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2019

No	Perkiraan Indikator Ekonomi Makro dan Sosial	Capaian 2017	Target 2019
1.	Jumlah penduduk	1.433.515	1.442.859
2.	Pertumbuhan ekonomi	5,20%	5,72% ± 0,25
3.	Kebutuhan investasi		22,88% dari PDRB
4.	Produktivitas perkapita (juta rp/org)	15,61	17,32
5.	Inflasi	3,58%	4,5% ± 0,25
6.	Pengangguran terbuka	7,33%	7%
7.	Kemiskinan	9,90%	9,25%
8.	KLB dan bencana alam		Pelaksanaan APBD tepat waktu
9.	Keamanan dan ketertiban		Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif dapat terlaksana dengan aman dan tertib

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAANDAERAH

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan

penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal (PAD)

- a. Meningkatkan target penerimaan Pendapatan Pajak Daerah antara lain melalui :
 - 1) Pajak Hotel, di Kota Slawi sudah berdiri Hotel Bintang 3 dan tingkat hunian kamar hotel mulai dari Hotel Bintang 3 sampai dengan Hotel Melati terutama di lokasi OW Guci setiap akhir minggu semakin tinggi yang dipengaruhi adanya kemudahan akses jalan tol sehingga banyak wisatawan dari Jakarta yang berlibur di Kabupaten Tegal yang tentunya diperkirakan akan meningkatkan pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hotel;
 - 2) Peningkatan Pajak Restoran, dengan perhitungan belanja makan minum dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2018 yang sekitar Rp. 15 milyar, maka bisa didapat Pajak Restoran dari penyedia jasa katering sebesar 10% atau sebesar Rp. 1,5 Milyar, termasuk perlu upaya intensifikasi pendapatan Pajak Restoran dari Restoran dan Rumah Makan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal;
 - 3) Peningkatan Pajak Reklame, dengan terbangunnya beberapa ruang terbuka hijau di Kota Kecamatan dan semakin banyaknya terpasang spot spot untuk pemasangan reklame, dan terbangunnya dua Videotron di Kota Slawi serta adanya penyelenggaraan pesta demokrasi berupa Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2018 maka penerimaan dari Pajak Reklame diperkirakan akan meningkat;
 - 4) Pajak Bumi dan Bangunan, masih ada pengalihan piutang pajak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tegal dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 yang belum tertagih, perlu ada upaya dari instansi yang terkait agar dapat meningkatkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu juga dengan naiknya NJOP Tanah di beberapa wilayah yang berpotensi di Kabupaten Tegal dan peralihan status tanah dari tanah kosong menjadi tanah dengan bangunan, tentunya akan meningkatkan pula penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 5) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), peningkatan penerimaan diperkirakan dari naiknya NJOP Tanah PBB dan intensitas peralihan hak atas tanah dan bangunan.
- b. Target penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Minerba Bukan Logam dan Batuan di Tahun 2018 diperkirakan menurun disebabkan sudah selesainya pekerjaan proyek Jalan Tol Trans Jawa yang kebutuhannya selama ini disuplai dari tanah urug yang berasal dari Kabupaten Tegal.
- c. Pendapatan Retribusi Daerah ada yang mengalami peningkatan tetapi ada pula yang mengalami penurunanyaitu :
 - 1) Retribusi Pasar Los, dengan adanya ketentuan baru nilai retribusi pasar los yang dikenakan kepada pedagang pasar, maka diperkirakan ada peningkatan penerimaan pendapatan;
 - 2) Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi LRA tidak lagi

- dikenakan retribusi, sehingga penerimaan dari retribusi pos ini tidak ada;
- 3) Retribusi Tempat Rekreasi diperkirakan akan meningkat karena ada kenaikan tarif masuk obyek wisata;
 - 4) Retribusi Perizinan tertentu untuk Izin Gangguan Tepat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi tidak lagi dikenakan, maka tidak ada lagi penerimaan pendapatan dari pos retribusi ini.
- d. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal karena adanya penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari Pendapatan BLUD diperkirakan akan meningkat dengan pertimbangan semakin tersedia dan terlengkapi sarana dan prasarana di RSUD dan Puskesmas-Puskemas.
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyediaan barang publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyempurnaan sistem pemungutan, peningkatan profesionalisme pegawai, dan lain-lain.
 - g. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar bidang SKPD yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.
 - h. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.

2. Kebijakan Umum Dana Perimbangan

- a. Memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2018, bahwa untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal dalam jangka menengah akan ditempuh dalam beberapa langkah utama, antara lain:
 - 1) Penyempurnaan payung hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga perlu dilakukan untuk memperkuat *local taxing power*.
 - 2) Memperkuat Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer, yaitu diberikan sebagai *reward* atas pencapaian kinerja daerah di bidang tata kelola keuangan daerah, pencapaian pembangunan di bidang tertentu, serta inovasi dan keunggulan spesifik yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
 - 3) Meningkatkan kualitas belanja APBD dengan mengatur penggunaan sebagian DTU (*earmarking*) untuk belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan

penyediaan pelayanan publik antar daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pegawai, menerbitkan peraturan tentang standar biaya yang berlaku bagi pusat dan daerah, mendorong penyerapan belanja daerah dan mengurangi penumpukan dana daerah di perbankan melalui kebijakan konversi Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi bentuk non tunai.

b. Mempedomani Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu :

- 1) Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal utamanya ditujukan untuk mendorong perbaikan pelayanan dasar publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kebijakan TKDD diarahkan pada sinkronisasi perencanaan/penganggaran TKDD agar sejalan dengan perencanaan/penganggaran K/L dan perbaikan mekanisme penyaluran TKDD berdasarkan pada kinerja pelaksanaan di daerah. Di samping itu, penggunaan sebagian Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan untuk belanja infrastruktur yang berorientasi pada pembangunan fasilitas layanan publik dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan pengurangan kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Sedangkan Pengalokasian Dana Transfer Khusus (DTK) diarahkan untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, serta afirmasi kepada daerah tertinggal dan perbatasan.
- 3) Kebijakan penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2018 akan dilakukan melalui peningkatan alokasi TKDD sesuai kemampuan keuangan negara yang diikuti dengan perbaikan distribusi dan peningkatan kualitas belanja di daerah.
- 4) Penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan hal penting sebagai kebijakan alokasi TKDD tahun 2018 karena memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (pusat-daerah) dan horizontal (antar daerah), mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Mempedomani pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2018 :

- 1) *Pertama*, meningkatkan alokasi TKDD secara proporsional serta meningkatkan sinkronisasi perencanaan/ penganggaran alokasi TKDD dengan perencanaan/ penganggaran alokasi belanja K/L.
- 2) *Kedua*, memperkuat implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, dengan:
 - (a) mengoptimalkan alokasi, penyaluran, dan penggunaan DBH, serta penyelesaian kurang/lebih bayar DBH;
 - (b) pagu DAU Nasional bersifat tidak final mengikuti dinamika PDN neto, menyempurnakan formulasi perhitungan PDN neto agar lebih mencerminkan kapasitas PDN yang sebenarnya, mengalokasikan DAU dengan memperhitungkan pengalihan kewenangan antar tingkat pemerintahan, dan memberikan afirmasi alokasi DAU kepada daerah kepulauan, tertinggal, dan perbatasan;
 - (c) melanjutkan pengaturan penggunaan 25 persen DTU untuk belanja infrastruktur, yang berupa belanja modal dan belanja pemeliharaan non aparatur, sehingga fokus pada belanja infrastruktur yang berorientasi pada

peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik guna meningkatkan perekonomian daerah, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah.

- 3) *Ketiga*, memperkuat implementasi DTK dalam mengurangi kesenjangan layanan public antar daerah melalui pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, serta afirmasi kepada daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan antarnegara, diantaranya melalui:
 - (a) meningkatkan alokasi DTK dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur dasar dan pencapaian standard pelayanan minimal;
 - (b) penyempurnaan dan *refocusing* bidang/sub bidang DAK Fisik agar lebih fokus pada upaya mengatasi ketimpangan layanan publik antardaerah dan pengalokasian DAK Fisik berdasarkan proposal dari daerah;
 - (c) peningkatan kualitas DAK Non Fisik melalui penerapan *performance based* untuk seluruh jenis DAK Non Fisik, peningkatan efektivitas pemantauan atas penggunaan, dan peningkatan akurasi data dasar dan *unit cost* pengalokasian DAK Non Fisik;
 - (d) peningkatan kualitas DAK Non Fisik melalui penerapan *performance based* untuk seluruh jenis DAK Non Fisik, peningkatan efektivitas pemantauan atas penggunaan, dan peningkatan akurasi data dasar dan *unit cost* pengalokasian DAK Non Fisik;
 - (e) penguatan penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian *output*.
- 4) *Keempat*, melakukan penguatan DID sebagai instrument insentif dalam TKDD, melalui peningkatan alokasi dan penyempurnaan kriteria DID dengan berdasarkan pada prestasi daerah, yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan output/outcome yang dihasilkan, dalam bentuk kategori tertentu antara lain di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) *Kelima*, distribusi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. *Ketujuh*, penguatan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan.

3. Kebijakan Umum Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- a. Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah.
- b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk upaya penjaminan ketersediaan penerimaan sumber-sumber dana penyesuaian berupa alokasi dana pendidikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Tunjangan Profesi Guru.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

Berkenaan dengan kebijakan umum pendapatan daerah seperti yang telah dijelaskan tersebut maka proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp.2.664.857.026.841,00 yang terdiri dari PAD Rp.404.143.464.341,00 (15,67%), Dana

Perimbangan Rp.1.576.737.628.500,00 (59,67%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.683.975.934.000,00 (25,67%).

Adapun proyeksi PAD terdiri dari komponen Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.102.328.000.000,00 (25,32%), Retribusi Daerah Rp.25.107.240.541,00 (6,21%), Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.15.355.000.000,00 (3,80%), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp.261.353.223.800,00 (64,67%). Sementara proyeksi Dana Perimbangan terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sebesar Rp.36.381.885.000,00 (2,31%), Dana Alokasi Umum Rp.1.174.494.182.000,00 (74,49%), dan Dana Alokasi Khusus Rp.365.861.561.500,00 (23,20%). Sedangkan proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Penerimaan Pendapatan Hibah Rp.152.846.800.000,00 (22,35%), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp.188.026.177.000,00 (27,49%), Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp.26.206.600.000,00 (3,38%), Dana Insentif Daerah Rp.35.000.000.000,00 (5,12%) dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat Rp.281.896.357.000 00 (41,31%).

Adapun rincian target pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 4.1.

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		PENDAPATAN APBD 2018	PENDAPATAN PPAS 2019	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	399.909.505.000	404.143.464.341	4.233.959.342	1,06
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96.590.344.000	102.328.000.000	5.737.656.001	5,94
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.968.290.000	25.107.240.541	3.138.950.541	14,29
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.186.048.000	15.355.000.000	(5.831.048.000)	(27,52)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	260.164.823.000	261.353.223.800	1.188.400.800	0,46
1.2	Dana Perimbangan	1.533.280.729.000	1.576.737.628.500	43.456.899.500	2,83
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.381.885.000	36.381.885.000	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.144.494.182.000	1.174.494.182.000	30.000.000.000	2,62
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	352.404.662.000	365.861.561.500	13.456.899.500	3,82
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	682.769.334.000	683.975.934.000	1.206.600.000	0,18
1.3.1	Pendapatan Hibah	152.846.800.000	152.846.800.000	-	-

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		PENDAPATAN APBD 2018	PENDAPATAN PPAS 2019	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	188.026.177.000	188.026.177.000	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	25.000.000.000	26.206.600.000	1.206.600.000	4,83
1.3.6	Dana Insentif Daerah	35.000.000.000	35.000.000.000	-	-
1.3.7	Dana Desa dari Pem. Pusat	281.896.357.000	281.896.357.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.615.959.568.000	2.664.857.026.841	48.897.458.842	1,87

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diprioritaskan untuk pemenuhan gaji PNS dan tunjangan PNS.

2. Belanja Hibah

Belanja hibah diprioritaskan untuk pencairan dana cadangan Pilkada, bantuan pada lembaga pendidikan swasta, dan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan guna mendukung Misi 3 RPJMD yaitu Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

3. Belanja Bantuan Sosial

- Belanja bantuan sosial diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah dan TPQ dalam bentuk tambahan kesejahteraan untuk pendidik.
4. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes diprioritaskan untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Desa.
 5. Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol
 - a) Bantuan Keuangan Umum, diprioritaskan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengembangan infrastruktur fisik dan sosial ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan.
 - b) Bantuan Keuangan Khusus, diprioritaskan untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk Program Rehab RTLH dan mencapai kondisi 100% akses sanitasi dalam bentuk Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dengan fokus pembangunan jamban sehat.
 6. Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga diprioritaskan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal yang bersifat mendesak.

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan, yaitu: (1) Pemenuhan layanan dasar pada masyarakat yang sesuai dengan SPM, (2) Peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, dan (3) Pembangunan infrastruktur, dengan memperhatikan afirmasi pada wilayah tertinggal dan terluar.

Belanja Langsung juga diarahkan untuk mengefisienkan belanja pegawai (karena sudah diwadahi dalam TPP), melakukan penghematan barang habis pakai pada belanja barang dan jasa, serta meningkatkan proporsi belanja modal dari total Belanja Langsung.

Prioritas-prioritas pembangunan yang tercantum pada Bab I merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Tahun 2014-2019 serta dalam RKPD Tahun 2018. Prioritas pembangunan 2018 dengan sasaran dan target kinerja yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2014-2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan, Indikator dan Target Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2019

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat	a) Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk memiliki:	84,21	100	100	100	100
		1) KTP	78,52	80	100	100	100
		2) Kartu Keluarga	1	20	30	30	30
		3) Akta Kematian	94,00	80	100	100	100
		4) Akta Kelahiran (0-18 tahun)					
	b) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	1) APK PAUD/TK (4-6 tahun)	33,70	70	75	75	75
			26,86	68	71	71	71
		2) APK PAUD/TK (0-4 tahun)	105,90	112	112	112	112
			117,28	97,28	98,28	98,28	98,28
		3) APK SD/SDLB/MI/Paket A	80,01	62,85	63,85	63,85	63,85
		4) APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	59,64	62,02	64,02	64,02	64,02
	92,36	98,93	98,93	98,93	98,93		
	5) APK SMA/SMALB/MA/Paket C	97,80	91,65	92,56	92,56	92,56	

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019	
berkebutuhan khusus (difabel)		6) APM PAUD TK	62.55	58,04	60,04	60,04	60,04	
		7) APM SD/SDLB/MI/Paket A	85.73	99,80	99,81	99,81	99,81	
		8) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99.99	76,00	78,00	78,00	78,00	
		9) APM SMA/SMALB/MA/Paket C	99.98	92,14	92,64	92,64	92,64	
		10) AT SD ke SMP sederajat	99.99	99,99	99,99	99,99	99,99	
		11) AT SMP ke SMA sederajat	99.98	99,99	99,99	99,99	99,99	
		12) AMH	99.98	99,99	99,99	99,99	99,99	
		13) Angka lulusan SD/MI						
		14) Angka Lulusan SMP/ MTs						
		15) Angka Lulusan SMA/MA/SMK						
		c) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan	1) Angka Harapan Hidup	69,90	69,43	69,58	69,58	69,58
			2) Jumlah kematian ibu	27	36	34	34	34
			3) AKB	0.15	8,10	7,90	7,90	7,90
			4) AKABA	14.29	8,8	8,6	8,6	8,6
			5) Persentase Puskesmas Terakreditasi	48.28	68,97	86,66	86,66	86,66

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
		6) Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	38,48	72,41	86,21	86,21	86,21
		7) Persentase PPK BLUD Puskesmas	100	100	100	100	100
		8) Klasifikasi RSUD dr. Soeselo	Kelas B	Kelas B	Kelas B	Kelas B	Kelas B
		9) ISO RSUD dr. Soeselo	0%	30%	40%	40%	40%
		10) Akreditasi RSUD dr. Soeselo	Paripurna	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna
	d) Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah	1) Persentase penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	2,46	5,2	6,5	6,5	6,5
		2) Persentase pengguna narkoba yang direhabilitasi	8	12,2	13	13	13
		3) Persentase lansia terlantar yang dibina	442,22	10,2	11,5	11,5	11,5
		4) Persentase jumlah anak yang terlantar, anak	11,73	11	13,8	13,8	13,8

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	nakal, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan direhabilitasi	5,63	6,2	7	7	7
		5) Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	62	28	29	29	29
		6) Persentase PMKS ditangani	68,24	7,2	8,6	8,6	8,6
		7) Persentase eks WTS yang diberdayakan	60,72	63,72	64,72	64,72	64,72
		8) Indeks Pembangunan Gender	51,15	65,16	70,16	70,16	70,16
		9) Indeks Pemberdayaan Gender	100	100	100	100	100
		10) Persentase korban bencana alam ditangani**					

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,	Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa	1) Jumlah kasus KKN	0	0	0	0	0
		2) Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	92	128	136	136	136
		3) Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan	42,26	92	93	93	93
		4) Jumlah kasus kepegawaian	52 35	45 22	43 21	43 21	43 21
		5) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	85	99,5	99,6	99,6	99,6
		6) Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 (satu) tahun	1	6	30	30	30
		7) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya (<i>skill, knowledge, attituted</i>)					
3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian,	a) Meningkatkan produksi unggul pertanian terutama	1) Jumlah kelompok petani organik**	1	1	1	1	1
		2) Jumlah jenis komoditas pertanian organik (1) yang didelegasikan	5	7 ha	9 ha	9 ha	9 ha

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)	(2) Yang bersertifikat** 3) Jumlah produsen pertanian organik 4) Jumlah luas lahan pertanian organik	0 4 5	2 jenis 7 7 ha	2 jenis 9 9 ha	2 jenis 9 9 ha	2 jenis 9 9 ha
	b) Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan	1) Kajian produk unggulan dan <i>origin-destination</i> produk pertanian** 2) Jumlah STA 3) Jumlah pasar induk 4) Jumlah PPI (Pusat Pendaratan Ikan) 5) Jumlah pasar hewan	2 0 1 2 3	1 1 1 2 4	1 1 1 2 5	1 1 1 2 5	1 1 1 2 5
	c) Meningkatnya infrastruktur pertanian	1) Panjang jalan usaha tani (dan nelayan) yang ditingkatkan 2) Panjang saluran irigasi tersier yang ditingkatkan 3) Panjang saluran irigasi utama yang ditingkatkan	8.5km 10.6 0 8.411	10 km 13 km 4.250 m 14.784 ha	11 km 14 km 5.500 m 14.784 ha	11 km 14 km 5.500 m 14.784 ha	11 km 14 km 5.500 m 14.784 ha

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
		4) Jumlah/cakupan air irigasi yang tersedia 5) Jumlah embung lapangan berfungsi baik	0	35	40	40	40
	d) Revitalisasi kelembagaan pertanian	1) Jumlah Kelompok Tani, Nelayan, Peternak: (1) Madya (2) Utama 1) Jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi 2) Jumlah penyuluh swadaya 3) Jumlah kantor BPPP yang memenuhi persyaratan.	389 45 11 146 14	485 320 38 140 13	505 400 48 165 16	505 400 48 165 16	505 400 48 165 16
	2) Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	1) Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan 2) Persentase luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipertahankan	0 0 0.001	1 100 % dari perda 0,05	1 100 % dari perda 0,05	1 100 % dari perda 0,05	1 100 % dari perda 0,05

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
		3) Persentase maksimal laju alih fungsi lahan pertanian					
	3) Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian dan industri pendukungnya	1) Jumlah demplot 2) Jumlah rekayasa TTG 3) Jumlah pemanfaatan hasil penelitian**	3 2 1	2 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1
	4) Meningkatnya keterlibatan jejaring <i>paseduluran</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) petani, peternak, dan nelayan di	Jumlah klaster pertanian**	1	1	1	1	1

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	wilayah tertinggal						
	5) Meningkatkan pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (<i>telecenter</i> eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian)	1) Jumlah <i>telecenter</i> bidang pertanian	1	4	5	5	5
		2) Jumlah <i>website</i> terkait pertanian	1	2	2	2	2
	6) Meningkatkan kemitraan antara pengusaha besar dan petani	Jumlah kerjasama pengusaha besar dan petani	2	3	3	3	3

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	7) Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukung pertanian	Jumlah Kelompok (KPK, KWT, LMDH) industri pengolahan hasil pertanian**	300	303	304	304	304
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan,	a) Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan	1) Jumlah pasar kabupaten dan desa yang direvitalisasi	3	7	9	9	9
		2) Jumlah pelaku usaha perdagangan baru	200	400	500	500	500
		3) Persentase kenaikan retribusi pasar**	7,6	3	3	3	3
		4) Panjang jalan pendukung perdagangan lokal yang terpelihara	0	37 km	45 km	45 km	45 km
	b) Meningkatnya jejaring perdagangan	1) Jumlah sistem informasi pasar (telecenter dsb)	3	4	5	5	5
		2) Jumlah pasar yang berjejaring	5	7	9	9	9

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	pasar tradisional						
	c) Meningkatkan daya saing perdagangan	1) Jumlah dokumen kajian penataan PKL	2	2	3	3	3
		2) Kawasan yang tertata PKL-nya	2	14	17	17	17
		3) Jumlah produk hukum daerah tentang jaringan toko ritel modern**	1	1	1	1	1
		4) Tingkat kesesuaian penambahan jaringan toko ritel modern dengan aturan yang berlaku**	0	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		5) Jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan	26	68	84	84	84
		6) Jumlah jenis usaha/kelompok usaha	0	34	42	42	42
		7) Jumlah lembaga yang menyalurkan bantuan permodalan	0	4	5	5	5

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	d) Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa	1) Jumlah kegiatan perlindungan konsumen	3	3	4	4	4
		2) Jumlah produsen /pedagang yang menerima sertifikat sehat	0	350	425	425	425
		3) Persentase pengaduan konsumen yang masuk dan tertangani	80	85	95	95	95
5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan	a) Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	1) Jumlah roadmap pengembangan industri unggulan	1	1	1	1	1
		2) Jumlah pelaku industri kreatif	60	80	100	100	100
			3	3	3	3	3
			5	5	5	5	5
			4) Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif pemuda**	120	140	160	160
	5) Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	24	32	40	40	40	

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
		6) Jumlah IKM yang menerapkan manajemen Industri					
	b) Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan	1) Jumlah kearifan lokal yang diadaptasi** 2) Jumlah TTG yang diterapkan melalui LIK (industri) dan Balai Penyuluhan Pertanian Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (pertanian)	1 3TTG	2 3TTG	2 4 TTG	2 4 TTG	2 4 TTG
	c) Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah	1) Jumlah kerjasama tentang pengembangan ekonomi lokal unggulan 2) Penetapan lokasi lokasi kawasan industri terpadu (bonded zone) 3) Promosi lokasi kawasan industri terpadu (bonded zone) pada investor**	10 0 0	3 1 lokasi siap 12	4 1 lokasi siap 12	4 1 lokasi siap 12	4 1 lokasi siap 12

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	d) Menguatnya kluster industri, pertanian, dan pariwisata	1) Jumlah kluster industri dan pertanian aktif	9	11	14	14	14
		2) Jumlah kerjasama pengembangan kluster industri dan pertanian	2	5	6	6	6
		3) Jumlah kluster wisata aktif (Cacaban, Purin, Guci, Semedo)	2	3	4	4	4
	e) Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan	Jumlah peraturan tentang sistem insentif ekonomi lokal unggulan**		1	1	1	1
	f) Meningkatkan pemanfaatan <i>telecenter</i> ekonomi lokal unggulan (non pertanian dan perdagangan)	1) Jumlah telecenter yang dipelihara**	1	1	1	1	1
2) Jumlah telecenter baru**		0	1	1	1	1	

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	g) Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandardisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah	1) Jumlah produk lokal yang tersertifikasi dan terstandarisasi	12	10	12	12	12
		2) Jumlah kebijakan penggunaan produk lokal dalam kegiatan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1
6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah	a) Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan	1) Daftar wilayah tertinggal	0	1	1	1	1
		2) Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah tertinggal	0	4 km	5 km	5 km	5 km
		3) Jumlah pasar desa yang diperbaiki	0	11	13	13	13

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)						
	b) Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)	1) Jumlah kota satelit 2) Kualitas layanan di kota satelit (SMA/K: akreditasi A; pasar: bersih dan aman; puskesmas: ISO terkait pelayanan)	1 Sesuai SPM	1 Sesuai SPM	1 Sesuai SPM	1 Sesuai SPM	1 Sesuai SPM

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	c) Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	Jumlah <i>telecenter</i> aktif di wilayah tertinggal**	0	3	3	3	3
	d) Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	1) Jumlah pelatihan pengembangan wilayah tertinggal**	0	1	1	1	1
		2) Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang aktif memberikan masukan dalam pengembangan wilayah tertinggal	1	1	1	1	1
	e) Terarahnya pengembangan wilayah	1) Jumlah kajian RDTR	18	18	18	18	18
		2) Jumlah Perda RDTR	0	18	18	18	18
			0	30	40	40	40

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
		3) Persentase pembangunan Jalingkos sisi barat 4) Persentase pembangunan Terminal Dukuhsalam	40	60	80	80	80
	f) Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	1) Frekuensi diseminasi Rencana Tata Ruang (termasuk sistem informasi) per tahun 2) Frekuensi pemantauan lapangan per tahun 3) Jumlah pelanggaran rencana tata ruang yang diproses per tahun	1 3 0	3 kali 4 kali 4	4 kali 5 kali 5	4 kali 5 kali 5	4 kali 5 kali 5
7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan,	a) Mewujudkan ruang yang manusiawi	1) Jumlah ruang terbuka publik 2) Jumlah taman kota 3) Jumlah tempat berkumpul masyarakat 4) Portal pengaduan masalah pembangunan daerah	5 4 5 1	4 4 4 1	5 5 5 1	5 5 5 1	5 5 5 1

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	b) Mewujudkan ruang yang berkelanjutan	1) Persentase usaha penambangan yang dipantau	0	85	90	90	90
		2) Jumlah kawasan industri B3 yang terkontrol**	0	1	1	1	1
		3) Persentase pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL)	60	70	75	75	75
		4) Persentase perusahaan pertambangan yang melakukan pemulihan lingkungan hidup	0	50	75	75	75
	c) Mewujudkan rintisan kota kembar (<i>sister city</i>)	Jumlah <i>Memorandum of Understanding</i> Program <i>Sister City</i>	0	0	0	0	0
8. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama,	a) Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan	1) Jumlah petatar (guru) nilai-nilai agama dan kepercayaan budaya rukun dan toleran	7.806	8.000	8.000	8.000	8.000
			1381	1.481	1.481	1.481	1.481

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
	kepercayaan yang inklusif	2) Jumlah lembaga pewarisan nilai-nilai agama dan kepercayaan 3) Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	0	1	1	1	1
	b) Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan	1) Frekuensi dialog antarumat beragama** 2) Jumlah kerjasama antarumat beragama** 3) Jumlah dialog wawasan kebangsaan**	2 1 0	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
	c) Menguatnya pembangunan kehidupan beragama	1) Rasio tempat ibadah agama dan kepercayaan dengan jumlah penduduk: (1) Masjid/Mushola (2) Gereja (3) Pura (4) Vihara (5) Klenteng	1:958 1:375 1:512 1:300 1:294	1:450 1:185 1:337 1:300 1:294	1:450 1:185 1:337 1:300 1:294	1:450 1:185 1:337 1:300 1:294	1:450 1:185 1:337 1:300 1:294

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
		(6) Sanggar Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)	1:100/ 7 HPK	1:100/ 7 HPK	1:100/ 7 HPK	1:100/ 7 HPK	1:100/ 7 HPK
9. Peningkatan fungsi kelembagaan Desa,	a) Berdayanya Kelembagaan Desa	1) Jumlah BPD yang menginisiasi Perdes	0	30	40	40	40
		2) Jumlah PKK desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK	287	142	175	175	175
		3) Strata Posyandu (Jumlah Posyandu 1.517):	33	26	19	19	19
		(1) Pratama	303	310	317	317	317
		(2) Madya	852	850	848	848	848
		(3) Purna	329	331	333	333	333
		(4) Mandiri	287	287	287	287	287
4) Jumlah Pos Kesehatan Desa yang memenuhi SPM (Misal: Peralatan, Bidan)							
5) Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat			116	24	23	23	23

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
		PNPM Mandiri Perkotaan	0	87	88	88	88
		(Jumlah BKM: 116):	0	5	5	5	5
		(1) Mandiri					
		(2) Berdaya					
		(3) Madani					
		6) Jumlah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri	13	12	13	13	13
		Perdesaan (13 UPK):	3	1	-	-	-
		(1) UPK surplus	0	Harp. 2	Harp. 1	Harp. 1	Harp. 1
		(2) UPK belum surplus	738	146	181	181	181
		7) Peringkat desa Kab. Tegal dalam lomba desa Tingkat Prov. Jateng	508	4.379	5.399	5.399	5.399
		8) Jumlah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang terlatih					
		9) Jumlah RTLH yang terpugar berdasar PPLS 2011 (27.013 RTLH	40	16	20	20	20

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019	
		kategori: lantai tanah/bambu, dinding kayu/bambu, tidak ada tempat BAB. Total PPLS: 116.073 RT) 10) Jumlah kelompok keluarga mitra dalam P2MBG						
10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa,	a) Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah	2. Tipologi Desa						
		(1)Swadaya	31	60	40	40	40	
		(2)Swakarya	238	100	110	110	110	
		(3)Swasembada	16	121	131	131	131	
		3. Terbangunnya jalan tembus desa/poros desa oleh TNI-Masyarakat	0	16	20	20	20	
		4. Jumlah desa yang mengisi data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga (DDK)						
		(1) Data terisi 0-50%	0	21	0	0	0	
(2) Data terisi 51-80	2	104	42	42	42			
		(2) Data terisi 51-80	285	162	245	245	245	

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	Target RPJMD 2019
		(3) Data terisi 81-100%					
	b) Meningkatkan derajat hidup masyarakat desa	1) Rasio sarana pendidikan di desa (1)PAUD (2)SD/MI (3)MDA 2) Rasio Posyandu per Balita 3) Rasio Akseptor KB 4) Jumlah pengunjung perpustakaan keliling 5) Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling 6) Jumlah lokasi layanan perpustakaan silang terpadu 7) Persentase BP-SPAM yang memakai meter air	 1.5 3 0.7 1:77 71.85 8.890 1 16 84,25	 1,6 3 0,8 1:77 88,07 5.640 1 4 70	 1,8 3 0,9 1:76 92,48 6.640 2 5 80	 1,8 3 0,9 1:76 92,48 6.640 2 5 80	 1,8 3 0,9 1:76 92,48 6.640 2 5 80

*Secara umum penghitungan target indikator bersifat kumulatif 2015-2019

**Target indikator dihitung tahun berkenaan

Menurut kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja OPD berkenaan. Adapun jumlah Belanja Langsung pada rencana belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp.1.261.421.805.628,00 yang terdistribusi ke 48 OPD. Adapun rekapitulasi Belanja Langsungnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Rekapitulasi Belanja Langsung per-OPD di Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2019

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2018	BELANJA LANGSUNG PPAS 2019	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	211.084.767.000	201.873.330.000	(9.211.437.000)	(4,36)
2	Dinas Kesehatan	159.667.665.000	151.700.097.000	(7.967.568.000)	(4,99)
3	RSUD Dr Soeselo	148.933.545.000	263.836.270.228	114.902.725.228	77,15
4	RSUD Suradadi	42.020.746.000	33.654.946.000	(8.365.800.000)	(19,91)
5	Dinas Pekerjaan Umum	244.341.827.000	230.000.270.000	(14.341.557.000)	(5,87)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	96.650.000.000	46.175.000.000	(50.475.000.000)	(52,22)
7	Kantor Kesbangpolinmas	1.852.970.000	1.209.921.900	(643.048.100)	(34,70)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	10.274.035.000	7.667.937.000	(2.606.098.000)	(25,37)
9	Dinas Sosial	4.960.000.000	4.133.836.000	(826.164.000)	(16,66)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.153.150.000	10.600.613.500	(552.536.500)	(4,95)
11	Dinas Lingkungan Hidup	19.985.000.000	18.115.000.000	(1.870.000.000)	(9,36)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.805.121.000	5.617.621.000	(187.500.000)	(3,23)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.902.100.000	8.186.100.000	(716.000.000)	(8,04)
14	Dinas Perhubungan	13.381.820.000	19.550.099.000	6.168.279.000	46,09
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.162.064.000	3.815.360.000	(1.346.704.000)	(26,09)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.282.000.000	3.427.000.000	145.000.000	4,42

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2018	BELANJA LANGSUNG PPAS 2019	JUMLAH	%
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.387.990.000	2.624.990.000	237.000.000	9,92
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	5.418.500.000	7.727.000.000	2.308.500.000	42,60
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.412.850.000	9.014.110.000	(398.740.000)	(4,24)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.682.842.000	32.518.533.000	8.835.691.000	37,31
21	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	21.621.910.000	34.976.910.000	13.355.000.000	61,77
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.103.360.000	12.862.000.000	6.758.640.000	110,74
23	Sekretariat Daerah	25.134.040.000	20.799.583.000	(4.334.457.000)	(17,25)
24	Sekretariat DPRD	24.526.000.000	21.899.120.000	(2.626.880.000)	(10,71)
25	Kecamatan Adiwerna	756.648.000	560.648.000	(196.000.000)	(25,90)
26	Kecamatan Balapulang	625.148.000	396.900.000	(228.248.000)	(36,51)
27	Kecamatan Bojong	996.848.000	470.848.000	(526.000.000)	(52,77)
28	Kecamatan Bumijawa	856.898.000	510.398.000	(346.500.000)	(40,44)
29	Kecamatan Dukuhturi	604.148.000	550.148.000	(54.000.000)	(8,94)
30	Kecamatan Dukuhwaru	487.558.000	495.558.000	8.000.000	1,64
31	Kecamatan Jatinegara	644.898.000	460.898.000	(184.000.000)	(28,53)
32	Kecamatan Kedungbanteng	793.558.000	474.058.000	(319.500.000)	(40,26)
33	Kecamatan Kramat	2.136.628.000	1.226.628.000	(910.000.000)	(42,59)
34	Kecamatan Lebaksiu	518.648.000	487.648.000	(31.000.000)	(5,98)
35	Kecamatan Margasari	542.781.000	562.531.000	19.750.000	3,64
36	Kecamatan Pagerbarang	594.398.000	654.000.000	59.602.000	10,03
37	Kecamatan Pangkah	744.148.000	557.148.000	(187.000.000)	(25,13)
38	Kecamatan Slawi	7.407.148.000	6.051.000.000	(1.356.148.000)	(18,31)
39	Kecamatan Suradadi	4.770.469.000	6.473.338.000	1.702.869.000	35,70
40	Kecamatan Talang	708.148.000	613.148.000	(95.000.000)	(13,42)
41	Kecamatan Tarub	684.148.000	467.148.000	(217.000.000)	(31,72)
42	Kecamatan Warurejo	611.148.000	543.148.000	(68.000.000)	(11,13)
43	BPBD	2.375.000.000	2.978.000.000	603.000.000	25,39
44	Inspektorat	3.408.800.000	9.804.500.000	6.395.700.000	187,62
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	8.058.500.000	7.551.500.000	(507.000.000)	(6,29)

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2018	BELANJA LANGSUNG PPAS 2019	JUMLAH	%
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.029.660.000	53.820.925.000	4.791.265.000	9,77
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.808.040.000	5.218.040.000	(1.590.000.000)	(23,35)
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelathan Daerah	8.138.000.000	8.508.000.000	370.000.000	4,55
	JUMLAH	1.208.045.670.000	1.261.421.805.628	53.376.135.628	4,42

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terbagi kedalam jenis belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun jumlah Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.1.541.194.824.136,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.1.029.303.823.000,00 (66,79%), Belanja Hibah Rp.37.044.000.000 00 (2,04%), Belanja Bantuan Sosial Rp.25.939.200.000,00 (1,68%), Belanja Bagi Hasil Rp.10.029.933.000,00 (0,65%), Belanja Bantuan Keuangan Rp.432.877.868.136,00 (28,09%), dan Belanja Tidak Terduga Rp.6.000.000.000,00 (0,39%).

Tabel 4.4.

Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019

NO	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA 2018	BELANJA TIDAK LANGSUNG PPAS TA 2019	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Belanja Pegawai	1.034.303.823.000	1.029.303.823.000	(5.000.000.000)	(0,48)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	68.947.218.000	37.044.000.000	(31.903.218.000)	(46,27)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.632.000.000	25.939.200.000	5.307.200.000	25,72
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemd	10.029.933.000	10.029.933.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemd es dan Parpol	441.155.868.000	432.877.868.136	(8.277.999.864)	(1,88)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
	JUMLAH	1.581.068.842.000	1.541.194.824.136	(39.874.017.864)	(2,52)

Sehingga dengan demikian, jumlah kebutuhan lokasi belanja daerah Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp.2.802.307.129.764,00 Jumlah tersebut lebih besar 5,17% atau Rp.137.759.602.923,00 dari rencana target pendapatan daerah.

3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Penggunaan SiLPA tahun 2019 adalah Rp.42.759.602.923,00 (29,95%) dan Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (70,05%). Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019 adalah Penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Tabel: 4.5.

**Struktur Alokasi Anggaran Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2019**

NO	URAIAN	PENETAPAN	RANCANGAN	BERTAMBAH	%
		APBD 2018	PPAS 2019	(BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.615.959.568.000	2.664.857.026.841	48.897.458.842	1,87
1.1	Pendapatan Asli Daerah	399.909.505.000	404.143.464.341	4.233.959.342	1,06

NO	URAIAN	PENETAPAN	RANCANGAN	BERTAMBAH	%
		APBD 2018	PPAS 2019	(BERKURANG)	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96.590.344.000	102.328.000.000	5.737.656.001	5,94
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.968.290.000	25.107.240.541	3.138.950.541	14,29
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.186.048.000	15.355.000.000	(5.831.048.000)	(27,52)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	260.164.823.000	261.353.223.800	1.188.400.800	0,46
1.2	Dana Perimbangan	1.533.280.729.000	1.576.737.628.500	43.456.899.500	2,83
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.381.885.000	36.381.885.000	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.144.494.182.000	1.174.494.182.000	30.000.000.000	2,62
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	352.404.662.000	365.861.561.500	13.456.899.500	3,82
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	682.769.334.000	683.975.934.000	1.206.600.000	0,18
1.3.1	Pendapatan Hibah	152.846.800.000	152.846.800.000	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	188.026.177.000	188.026.177.000	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	25.000.000.000	26.206.600.000	1.206.600.000	4,83
1.3.6	Dana Insentif Daerah	35.000.000.000	35.000.000.000	-	-
1.3.7	Dana Desa dari Pem. Pusat	281.896.357.000	281.896.357.000	-	-
2	BELANJA	2.789.114.512.000	2.802.616.629.764	13.502.117.764	0,48
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.581.068.842.000	1.541.194.824.136	(39.874.017.864)	(2,52)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.034.303.823.000	1.029.303.823.000	(5.000.000.000)	(0,48)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	68.947.218.000	37.044.000.000	(31.903.218.000)	(46,27)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.632.000.000	25.939.200.000	5.307.200.000	25,72
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	10.029.933.000	10.029.933.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota, Pemdes dan Parpol	441.155.868.000	432.877.868.136	(8.277.999.864)	(1,88)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.208.045.670.000	1.261.112.305.628	53.066.635.628	4,39
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	211.084.767.000	201.873.330.000	(9.211.437.000)	(4,36)
2	Dinas Kesehatan	159.667.665.000	151.700.097.000	(7.967.568.000)	(4,99)
3	RSUD Dr Soeselo	148.933.545.000	263.836.270.228	114.902.725.228	77,15
4	RSUD Suradadi	42.020.746.000	33.654.946.000	(8.365.800.000)	(19,91)
5	Dinas Pekerjaan Umum	244.341.827.000	230.000.270.000	(14.341.557.000)	(5,87)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	96.650.000.000	46.175.000.000	(50.475.000.000)	(52,22)

NO	URAIAN	PENETAPAN	RANCANGAN	BERTAMBAH	%
		APBD 2018	PPAS 2019	(BERKURANG)	
	Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan				
7	Kantor Kesbangpolinmas	1.852.970.000	1.209.921.900	(643.048.100)	(34,70)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	10.274.035.000	7.667.937.000	(2.606.098.000)	(25,37)
9	Dinas Sosial	4.960.000.000	4.133.836.000	(826.164.000)	(16,66)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.153.150.000	10.600.613.500	(555.536.500)	(4,95)
11	Dinas Lingkungan Hidup	19.985.000.000	18.115.000.000	(1.870.000.000)	(9,36)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.805.121.000	5.617.621.000	(187.500.000)	(3,23)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.902.100.000	8.186.100.000	(716.000.000)	(8,04)
14	Dinas Perhubungan	13.381.820.000	19.550.099.000	6.168.279.000	46,09
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.162.064.000	3.815.360.000	(1.346.704.000)	(26,09)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.282.000.000	3.427.000.000	145.000.000	4,42
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.387.990.000	2.624.990.000	237.000.000	9,92
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	5.418.500.000	7.727.000.000	2.308.500.000	42,60
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.412.850.000	9.014.110.000	(398.740.000)	(4,24)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.682.842.000	32.518.533.000	8.835.691.000	37,31
21	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	21.621.910.000	34.976.910.000	13.355.000.000	61,77
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.103.360.000	12.862.000.000	6.758.640.000	110,74
23	Sekretariat Daerah	25.134.040.000	20.799.583.000	(4.334.457.000)	(17,25)
24	Sekretariat DPRD	24.526.000.000	21.899.120.000	(2.626.880.000)	(10,71)
25	Kecamatan Adiwerna	756.648.000	560.648.000	(196.000.000)	(25,90)
26	Kecamatan Balapulang	625.148.000	396.900.000	(228.248.000)	(36,51)
27	Kecamatan Bojong	996.848.000	470.848.000	(526.000.000)	(52,77)
28	Kecamatan Bumijawa	856.898.000	510.398.000	(346.500.000)	(40,44)
29	Kecamatan Dukuhturi	604.148.000	550.148.000	(54.000.000)	(8,94)
30	Kecamatan Dukuhwaru	487.558.000	495.558.000	8.000.000	1,64
31	Kecamatan Jatinegara	644.898.000	460.898.000	(184.000.000)	(28,53)
32	Kecamatan Kedungbanteng	793.558.000	474.058.000	(319.500.000)	(40,26)
33	Kecamatan Kramat	2.136.628.000	1.226.628.000	(910.000.000)	(42,59)
34	Kecamatan Lebaksiu	518.648.000	487.648.000	(31.000.000)	(5,98)
35	Kecamatan Margasari	542.781.000	562.531.000	19.750.000	3,64
36	Kecamatan Pagerbarang	594.398.000	654.000.000	59.602.000	10,03
37	Kecamatan Pangkah	744.148.000	557.148.000	(187.000.000)	(25,13)
38	Kecamatan Slawi	7.407.148.000	6.051.000.000	(1.356.148.000)	(18,31)

NO	URAIAN	PENETAPAN	RANCANGAN	BERTAMBAH	%
		APBD 2018	PPAS 2019	(BERKURANG)	
39	Kecamatan Suradadi	4.770.469.000	6.473.338.000	1.702.869.000	35,70
40	Kecamatan Talang	708.148.000	613.148.000	(95.000.000)	(13,42)
41	Kecamatan Tarub	684.148.000	467.148.000	(217.000.000)	(31,72)
42	Kecamatan Warurejo	611.148.000	543.148.000	(68.000.000)	(11,13)
43	BPBD	2.375.000.000	2.978.000.000	603.000.000	25,39
44	Inspektorat	3.408.800.000	9.804.500.000	6.395.700.000	187,62
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	8.058.500.000	7.551.500.000	(507.000.000)	(6,29)
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.029.660.000	53.820.925.000	4.791.265.000	9,77
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.808.040.000	5.218.040.000	(1.590.000.000)	(23,35)
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	8.138.000.000	8.508.000.000	370.000.000	4,55
	SURPLUS / (DEFISIT)	(173.154.944.000)	(137.759.602.923)	35.395.341.077	(20,44)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	173.154.944.000	137.759.602.923	(35.395.341.077)	(20,44)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	182.003.944.000	142.759.602.923	(39.244.341.077)	(21,56)
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	169.163.402.000	42.759.602.923	(126.403.799.077)	(74,72)
3.1.5	Penerimaan Kembali Dana Cadangan Pilkada	12.840.542.000		(12.840.542.000)	(100,00)
	Penerimaan Piutang Daerah		100.000.000.000	100.000.000.000	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.849.000.000	5.000.000.000	(3.849.000.000)	(43,50)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.849.000.000	5.000.000.000	(3.849.000.000)	(43,50)
3.2.3	Cadangan Pilkada Bupati				
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0	0
	SILPA TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0

BAB V PENUTUP

Demikianlah Kebijakan umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Slawi, 30 Juli 2018

Plt. BUPATI TEGAL



Dra. UMI AZIZAH